



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL DAN
PLT. DIRJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis/6 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.30 -15.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Acara	: 1. Membahas Penanganan <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i> ; 2. Membahas Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan; dan 3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: ... dari orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 9 dari 12 orang Anggota: 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Drs. I Made Urip, M.Si. 4. Ir. Effendi Sianipar 5. H. Yadi Srimulyadi

6. Ir. Mindo Sianipar
7. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 Dari 8 orang Anggota:

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil ketua
2. Firman Soebayo, S.E., M.H.
3. Ir. Ichsan Firdaus
4. Budhy Setiawan
5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
6. Alien Mus (S.H.)

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

- dari 6 orang Anggota (Izin Fraksi)

4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NasDem)

3 dari 5 orang Anggota:

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. Sri Wulan, S.E.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota:

1. H. Muhtarom, S.Sos.
2. Luluk Nur Hamidah, M.Si.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Drs. H. Ibnu Multazam.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota:

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

1 dari 4 orang Anggota:

1. Haerudin, S.Ag., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

- dari 2 orang Anggota (Izin Fraksi)

B. Pemerintah:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan

- dan Perikanan (Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc.);
2. Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 3. Direktur LPMUKP (Syarif Syahrial, S.E., M.SE.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, hadir sebelah kiri saya Bapak Ketua yang hari ini menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada saya,

Yang terhormat Sekretaris Jenderal yang juga selaku Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya sejak tadi menunggu mukanya kelihatannya cerah, *insya Allah* ketuanya hari ini agak baik, Hadirin yang saya hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020, pada hari Kamis, 6 Februari 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas penanganan dan permodalan bagi pelaku usaha perikanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV DPR RI, saat ini Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditanda tangani 14 orang dari 6 fraksi, sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI ada 54 orang dan kemudian terdiri dari 9 fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI kita tunda dulu 5 menit.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

(RAPAT DISKORS)

Dan diakhiri pada pukul 15.00 WIB dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan susunan acara sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan KKP terhadap agenda rapat.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI.
4. Jawaban KKP.
5. Kesimpulan rapat.
6. Penutup.

Dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam periode kedua ini adalah berkomitmen kepada pembangunan pengembangan serta peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan, melalui komunikasi yang baik dan intens upaya ini disambut hangat oleh seluruh lapisan masyarakat terutama para pelaku usaha perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian kerakyataan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijaga dan dilestarikan karena akibat aktifitas ilegal fishing Indonesia dirugikan setiap tahunnya kurang lebih 20 Miliar US Dolar atau sekitar Rp260 triliun.

Pencurian ikan di laut suatu negara merupakan kejahatan trans nasional yang memiliki dampak yang luar biasa besarnya. Dalam prakteknya kegiatan pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lainnya, seperti penyelundupan barang, manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan lainnya sehingga untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia diperlukan *political will* seluruh pemangku kebijakan.

Untuk itu Komisi IV DPR RI mendukung agar KKP memperkuat armada sumber daya manusia, pengawasan kelautan dan perikanan untuk mencegah ilegal fishing di wilayah Indonesia dan untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat pesisir. Harapannya sektor kelautan dan perikanan tercipta kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian, serta daya saing para pelaku utama perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pertambak garam yang sesuai dengan amanah dasar konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya terkait dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia yang masih tergolong belum

sepenuhnya sejahtera atau miskin karena masih banyak yang belum mandiri dan masih banyak terkendala permodalan usaha, maka dituntut bentuk sistem manajemen usaha pelaku utama kelautan dan perikanan memiliki pegawai dengan pengetahuan yang cukup memadai.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI mendorong agar LPMUKP dapat membeirkan kemudahan akses pinjaman modal dengan dan tanpa menaikkan suku bunga karena dapat berimplikasi kepada menurunnya tingkat penyaluran dana LPMUKP dan akan memunculkan stigma negatif di kalangan pelaku usaha.

Selain itu, Komisi IV DPR RI mendorong LPMUKP agar memperkuat tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia agar mampu memberikan pemahaman mengenai skema pinjaman atau ke calon debitur atau nasabah secara utuh, serta kedepan LPMUKP dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat, mengingat selama ini pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan melalui bank konvensional karena dinilai beresiko tinggi, sehingga kelahiran LPMUKP merupakan solusi yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 3 dimana tujuannya antara lain memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha di bidang kelautan.

Dan barangkali salah satu wacana yang selama ini berkembang di antara kita para Anggota Komisi IV DPR RI bahwa problem dari para nelayan itu selain modal untuk melaut juga sebenarnya kemampuan dunia perkapalan mereka. Sehingga kawan-kawan semua itu hampir semuanya menginginkan kedepan agar bantuan perahu untuk para nelayan jumlahnya ditambah dan perahu yang diberikan kapasitasnya memadai, serta sesuai dengan kebutuhan lingkungan dimana dia mengambil ikan. Karena mungkin perahu di Indramayu berbeda dengan perahu di Maluku pendekatannya. Dan kapasitasnya harus ditingkatkan, sehingga mereka tidak tergantung lagi kepada tuan-tuannya yang setiap hari mereka hanya menjadi kuli dari perahu yang dikelola yang harus disetor hasil pendapatannya kepada tokenya, itu ya pertama.

Yang kedua adalah ini hasil waktu itu saya kunjungan ke Aceh, agar segera dibentuk kelembagaan yang satu pintu untuk ijin perkapalan yang di atas 60 GT, sehingga tidak harus lagi ke perhubungan, geser lagi perikanan tetapi satu kelembagaan sehingga mereka bisa mengaksesnya dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kemampuan para nelayan kita untuk menangkap ikan-ikan yang besar agar tidak kalah dengan kapal-kapal yang asing.

Untuk selanjutnya, dipersilakan Bapak Sekretaris Jenderal plus Direktur Jenderal ini dua jabatannya, berarti bintangnya ada 8, ada Sekretaris Jenderal plus Direktur Jenderal tidak kebayang itu tunjungannya berarti tunjungan 8 Jenderal. Dipersilakan untuk memberikan penjelasan, *style*-nya

memang agak beda kalau Pak Ketua *style*-nya harimau yang gagah, kalau saya anak harimau yang lagi belajar menyusui, jadi agak cengengesan sedikit.

Terima kasih dan dipersilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebijakan.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Para pejabat Eselon II beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal PSDKP
Kemneterian Kelautan dan Perikanan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendiskusikan penanganan ilegal fishing.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, selama 5 tahun terakhir sesuai dengan arahan Presiden telah berperan aktif dalam pemberantasan ilegal fishing. Program dan kegiatan dalam pemberantasan ilegal fishing yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal PSDKP, antara lain yang pertama melakukan operasi pengawasan di laut dengan memanfaatkan data hasil analisis dari pusat pengendalian yang di validasi melalui *airbone surveillance* serta dilakukan penghentian pemeriksaan dan penindakan atau yang lazim dikenal dengan hendrikan oleh kapal pengawas. Yang kedua, melakukan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Yang ketiga, pemberian efek jera bagi pelaku ilegal fishing melalui penenggelaman kapal. Yang keempat, penanganan awak kapal pelaku ilegal fishing. Kelima, pemulangan awak kapal ikan Indonesia yang ditangkap diluar negeri.

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 hasil operasi pengawasan di laut dengan menggunakan 34 kapal pengawas telah melakukan penangkapan 619 kapal ikan yang melakukan pelanggaran, yang terdiri dari 243 kapal ikan Indonesia dan 376 kapal ikan asing. Dengan rincian berturut-turut 238 kapal berbendera Vietnam, 75 kapal berbendera Malaysia

dan 62 kapal berbendera Philipina dan 7 kapal berbendera Thailand, 1 kapal berbendera RRT, 1 kapal berbendera Timor Leste dan 1 kapal berbendera Panama.

Sementara dari kegiatan *airbone survailance* selama kurun waktu tahun 2012-2019 telah ...

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, saya interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan, baru sekarang boleh dipersilakan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Dimundurkan lagi tadi tayangannya. Nah, kita lihat setiap tahun hari operasional kapal pengawasnya semakin turun coba. Setahu saya di jaman Pak Fadel, Pak Cicip, bisa mencapai 200 hari lebih. Ini setiap tahun menurun coba llihat, ini bagaimana nanti. Saya minta penjelasannya Bapak Pimpinan, supaya semua Anggota tahu kenapa bisa turun, sedangkan anggarannya dikasih banyak tidak terpakai. Nanti saja dijelaskannya sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, dipersilakan untuk disela untuk boleh itu dijelaskan khusus untuk Ketua kalau yang lain tidak boleh.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, mohon ijin boleh kami lanjutkan.

Sementara dari kegiatan *airbone survailance* atau patroli udara selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 telah mendeteksi 71 kapal pelaku ilegal fishing yang ditindaklanjuti dengan penangkapan oleh kapal pengawas serta telah menertibkan 260 Rumpon ilegal. Di samping pengawasan di laut dalam rangka kepatuhan kapal perikanan Indonesia sebelum melakukan operasi penangkapan para pengawasan perikanan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu 2015-2019 setiap tahun rata-rata sebanyak 23.473 kapal telah diperiksa dengan hasil sebesar 94,96% kapal telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan diterbitkan surat layak operasi atau sering dikenal dengan SLO oleh pengawas perikanan. Sedangkan sebesar 5,04% kapal tidak layak operasi dan tidak diterbitkan SLO.

Kegiatan penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan atau TPKP dalam kurun waktu tahun 2015-2019 telah dilakukan proses hukum terhadap 976 kasus dengan rincian tahun 2015 sebanyak 198 kasus. Tahun 2016 sebanyak 230 kasus dan tahun 2017 sebanyak 197 kasus dan tahun 2018 sebanyak 193 kasus serta tahun 2019 sebanyak 151 kasus.

Selain itu, untuk memberikan efek jera atau deterrent effect kepada pelaku ilegal fishing melalui Satgas 115 telah dilakukan penenggelaman kapal pelaku ilegal fishing sebanyak 556 kapal dengan rincian paling banyak kapal berasal dari Vietnam 231 kapal, Philipina sebanyak 91 kapal, Malaysia 87 kapal.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Ijin Pimpinan, interupsi.

Nanti saudara Sekjen tolong dijelaskan yang 500 sekian itu hasil tangkapan tahun berapa, jadi tolong dirinci. 511 selama 5 tahun terakhir itu tangkapan tahun berapa, berapa unit, itu saya minta rinciannya supaya *clear*.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti dijawab.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua untuk pertanyaannya.

Dan mohon ijin Bapak Ketua, slide yang kita saksikan bersama ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Ketua. Mohon ijin boleh kami lanjut, Philipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 46 kapal, Tiongkok 3 kapal, Nigeria 1 kapal, dari Belis 1 kapal serta Indonesia 26 kapal.

Selanjutnya Dirjen PSDKP juga telah menangani awak kapal perikanan pelaku ilegal fishing yang ditangkap dalam kurun waktu tahun 2015-2019 telah dilakukan penanganan terhadap 4.089 awak kapal yang terdiri dari Vietnam sebanyak 1.984 orang. Philipina 463 orang, Thailand 182 orang, Nyanmar 145 orang, Tiongkok 84 orang, Kamboja 45 orang, Malaysia 29 orang, Rusia 17 orang, Laos 2 orang serta Indonesia 1.129 orang.

Selanjutnya sejumlah 2.962 orang dilakukan pemulangan ke negara asalnya melalui kerja sama dengan Ditjen Imigrasi. Selain itu, selama 5 tahun Direktorat Jenderal PSDKP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri telah berhasil memulangkan 720 orang nelayan Indonesia yang ditangkap di

luar negeri karena melintas batas pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Alokasi anggaran Ditjen PSDKP selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini tentu berpengaruh terhadap upaya pemberantasan ilegal fishing. Tetapi sesuai dengan komitmen Ditjen PSDKP hampir 50% dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pemberantasan ilegal fishing.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan salah satu isu yang menarik perhatian khlayak para akhir tahun 2019 yang lalu tentang ilegal fishing yang marak terjadi di Laut Natuna Utara. Di perairan Indonesia berdasarkan analisa data dari VMS (*Vessel Monitoring System*) terdapat 3 WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia) dengan aktifitas penangkapan ikan paling ramai, yaitu di WPPNRI 711, 712, dan 718, sedangkan wilayah Indonesia yang masih minim kegiatan kapal perikanan di WPP 717. Apabila kita lihat sebaran kapal ikan dengan ukuran di atas 30 GT di perairan Laut Natuna Utara atau di WPP 711 sepanjang 2019 aktifitas penangkapan ikan mulai marak pada bulan Maret dan mencapai puncaknya pada bulan November 2019.

Berdasarkan data yang diolah oleh Pusdal Ditjen PSDKP sebanyak lebih kurang 1.300 kapal telah beroperasi di WPPNRI 711 dan 106 kapal terpantau beroperasi di Laut Natuna Utara bagian barat. Saat ini, armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP sebanyak 34 unit kapal pengawas untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia. Untuk pengawasan WPPNRI 711 Ditjen PSDKP menempatkan 7 kapal pengawas dengan rincian berturut-turut 3 kapal pengawas pangkalan PSDKP Batam, yaitu kapal pengawas Hiu 06, Hiu 03 serta Hiu 04, 2 kapal stasiun PSDKP Pontianak, yaitu kapal Hiu Macan 01, serta kapal Hiu 11, serta 2 dukungan kapal pengawas dari pusat, yaitu kapal Orcha.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan mekanisme operasi kapal pengawas Ditjen PSDKP pada akhir tahun lalu di Laut Natuna Utara. Pada tanggal 29 Desember 2019 dari data AIS (*Automatic Information System*) terpantau aktifitas kapal-kapal berbendera Vietnam dan Tiongkok. Selain itu, terdapat juga 2 unit kapal pengawas perikanan Vietnam berada di garis batas landas kontinen di utara Laut Natuna Utara dan 3 unit kapal kapal coast guard Tiongkok berada di Indonesia dan beberapa kali masuk landas kontinen sampai 20 nautical mile di timur Laut Natuna Utara.

Sebagai upaya pengamanan atas sumber daya kelautan dan perikanan Ditjen PSDKP melakukan operasi pengawasan dengan menerjunkan 3 unit kapal pengawas sekaligus, yaitu kapal Orcha 3, kapal Hiu Macan 01, serta kapal Hiu 11. Pada tanggal 30 Desember 2019, 3 unit kapal pengawas tersebut berhasil melakukan hendrikan atas 3 unit kapal ikan asing Vietnam yang dalam proses penghentian membutuhkan effort atau usaha yang sangat besar di karenakan semua kapal ikan asing tersebut menolak untuk berhenti dan bahkan melakukan perlawanan kepada petugas di atas 3

kapal pengawas KPP tersebut. Kapal Hiu 11 pun mengalami kerusakan pada haluan karena menabrak badan kapal ikan asing Vietnam. Ketiga kapal ikan asing Vietnam tersebut selanjutnya dibawa ke stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses hukum lebih lanjut. Rincian ketiga kapal Vietnam yang ditangkap ukuran kapal berturut-turut 125 GT, serta 2 kapal berukuran 98 GT dengan total jumlah awak kapal dari ketiga kapal asing Vietnam tersebut sebanyak 36 orang.

Dengan adanya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah di Laut Natuna Utara KPP telah menyusun langkah-langkah strategis dan rencana aksi dalam pemanfaatan potensi perikanan di wilayah perairan tersebut, antara lain:

1. Pemberdayaan nelayan Natuna.
2. Operasionalisasi kapal bantuan Pemerintah.
3. Penguatan infrastruktur sentra kelautan dan perikanan terpadu di Natuna di Selat Lampa.
4. Peningkatan kelembagaan koperasi nelayan.
5. Menghadirkan nelayan yang berasal dari luar Natuna.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Melalui Rapat Dengar Pendapat ini, kami ingin menyampaikan juga arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan seluruh stake holder Kelautan dan Perikanan.
2. Mengoptimalkan perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industry kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industry. Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP untuk melakukan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui:

1. Akan menindak tegas terhadap kapal ikan asing pelaku ilegal fishing dan distrubsi fishing.
2. Melakukan pembinaan dan penataan terhadap nelayan lokal dengan strategi yang akan dilakukan melalui pengembangan SDM aparatur, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP.
4. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut, seperti dari TNI AL, Pol Air dan Bakamla.

5. Membangun komunikasi dengan stake holder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2020 Ditjen PSDKP memiliki beberapa kegiatan prioritas dalam upaya penanggulangan ilegal fishing, antara lain:

1. Operasional kapal pengawas dan patroli udara sebanyak 150 hari operasi.
2. Operasional speedboat pengawasan sebanyak 50 hari operasi.
3. Pengadaan 2 unit kapal pengawas tipe C berukuran 32 meter.
4. Pengadaan 11 unit speedboat pengawasan untuk mendukung operasi di UPT PSDKP, serta pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Strategi operasi yang akan diterapkan antara lain fokus pada kapa lasing dan melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal ikan Indonesia. Memanfaatkan big data analysis yang kita peroleh dari radar, AIS serta VMS, informasi dari masyarakat serta analisa data musim ikan untuk melakukan intercept di daerah rawan ilegal fishing serta penguatan kerja sama operasi dengan instansi terkait dan kerja sama di perbatasan negara lain.

Selain hal tersebut, kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas PPNS Perikanan serta akan melakukan penerimaan hakim ad hoc perikanan sebagai penguatan SDM di bidang penanganan pelanggaran kasus-kasus tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pagu alokasi anggaran Ditjen PSDKP tahun 2020 sebesar Rp1,062 triliun dengan alokasi yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Ditjen PSDKP untuk penanganan ilegal fishing di perairan Indonesia sebesar Rp651,295 miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Salah satu lokasi yang paling rawan terjadi ilegal fishing adalah perairan Natuna. Mempertimbangkan kerawanan tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2017 telah membangun pangkalan PSDKP di Batam dengan fokus operasi di perairan Natuna Utara. Selain itu, wilayah operasi pangkalan PSDKP Batam terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, serta Kepulauan Riau.

Saat ini pangkalan PSDKP Batam telah memiliki sarana dan prasarana pengawasan yang agak memadai untuk melakukan tugas dan fungsi operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Beberapa fasilitas yang telah dimiliki antara lain, kantor administrasi, dermaga kapal pengawas, rumah penampungan ABK non yustisia atau sering disebut sebagai *detention center*, mess awal kapal pengawas, serta gudang barang bukti. Untuk operasi pengawasan di laut terdiri dari 3 unit kapal pengawas, 8 speedboat dan 2 rijit inflatable boat, serta 3 rubber boat. Sedangkan SDM pengawasan yang dimiliki sejumlah 75 orang yang terdiri dari pengawas

perikanan, PPNS dan Polsus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tenaga administrasi.

Dengan banyaknya kapal pelaku ilegal fishing yang di ad hoc ke pangkalan PSDKP Batam menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain dermaga kapal pengawas dipenuhi oleh kapal-kapal ilegal fishing yang masih menjalani proses hukum, baik banding maupun kasasi sehingga menyulitkan kapal pengawas untuk dapat sandar dengan baik. Kapasitas rumah penampungan sementara ABK Non Yustisia atau *detention center* tersebut saat ini terbatas pada saat banyak kapal ilegal fishing yang harus di ad hoc ke pangkalan PSDKP.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Mohon ijin kalau boleh saya lanjut menjelaskan tentang LPMUKP. Pertama-tama ijin kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga ini untuk dapat menjelaskan mengenai kebijakan permodalan di KKP. Secara khusus saya menyimak bahwa adanya keinginan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat, untuk mengetahui perkembangan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan atau sering kita dengar disebutnya dengan LPMUKP sebagai badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan ini saya juga mengajak Direktur LPMUKP yang duduk di sebelah kanan mohon berdiri Pak, untuk hadir bersama saya pada Rapat Dengar Pendapat yang terhormat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, permodalan merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi nasional termasuk sektor kelautan dan perikanan. KKP terus mendorong akses permodalan ini melalui sejumlah kebijakan, salah satunya dengan pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP.

LPMUKP memiliki tugas dan fungsi untuk menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan kepada UMKM Kelautan dan Perikanan. Hadirnya LPMUKP semakin penting karena lebih dari 85% pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil. LPMUKP juga diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan bagi nelayan dan UMKM kelautan dan perikanan lainnya. Terkadang kami juga melihat masih ada anggapan atau stereotipe dari kalangan perbankan bahwa sektor kelautan dan perikanan sangat tinggi. Padahal dengan proses mitigasi resiko yang tepat sektor kelautan dan perikanan sangat potensial untuk dibiayai. LPMUKP dapat menjadi jembatan awal pembiayaan dalam memoderasi resiko tersebut.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, BLU LPMUKP melalui *revolving financing* merupakan salah satu instrument kebijakan KPP terkait dengan permodalan. Skenario akses permodalan tergantung kepada tipologi usaha para pelaku usaha. Jika usaha menengah dan besar, kami mendorong kredit komersial untuk dapat membiayainya.

Kami juga memberikan stimulus proses penumbuhan usaha melalui bantuan Pemerintah, pelatihan, pendampingan dan penyuluhan. Dalam tahapan pengembangan usaha peran BLU LPMUKP dapat mengisi celah ini begitu pula dengan kredit usaha rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Edhy Prabowo secara khusus menekankan optimalisasi kredit usaha rakyat mengingat besarnya alokasi kredit usaha rakyat yang disediakan oleh Pemerintah. Tetapi kami menyadari juga bagi kalangan perbankan perlu mempertimbangkan resiko usaha sehingga penilaian mitigasi resiko inilah menjadi keunggulan layanan BLU LPMUKP.

LPMUKP memiliki tenaga pendamping dan bekerja sama dengan penyuluh perikanan untuk mengenal prospek usaha dari calon debitur. Ini adalah dasar hukum beroperasinya LPMUKP. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPR RI karena melalui Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Nelayan yang menjadi inisiatif Komisi IV DPR RI telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk hadirnya skema pendanaan khusus bagi sektor kelautan dan perikanan. BLU LPMUKP merupakan manivestasi dari skema pendanaan khusus tersebut.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Adapun target sasaran yang dapat dibiayai oleh pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP, yaitu berupa UMKM sektor kelautan dan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, termasuk seluruh usaha pendukungnya, usaha garam rakyat, usaha masyarakat pesisir lainnya, seperti halnya Kedai Bahari, Wisata Bahari dan lain sebagainya.

Pada tayangan berikut ini, merupakan gambaran proses bisnis terkait pengajuan dan persetujuan pinjaman dana bergulir pada BLU LPMUKP. Proposal pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan mikro KP, koperasi usaha, kelompok usaha, maupun pelaku usaha di ketahui dan diperiksa oleh tenaga pendamping LPMUKP yang ada pada lokasi layanan pendampingan atau disebut dengan LLP, untuk kemudian disampaikan kepada LPMUKP. Secara sederhana terhadap 4 tahapan proses persetujuan berturut-turut, yang pertama adalah di tingkat tenaga pendamping, di tingkat analis kredit, komite pinjaman dan persetujuan.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa BLU LPMUKP ditetapkan menjadi Satker BLU pada September 2016. Namun, BLU LPMUKP baru mendapatkan alokasi dana kelolaan BLU pada tahun anggaran 2017, yaitu sebesar Rp500 miliar. Pencairan alokasi dana kelolaan tersebut baru dapat terealisasi pada bulan Oktober 2017. Terhitung sejak bulan Oktober 2017 tersebut, hingga akhir tahun 2017 BLU LPMUKP menyelenggarakan layanan pada 111 lokasi layanan pendampingan dan menyalurkan pinjaman sebanyak Rp11,12 miliar. Pada tahun 2018 LPMUKP mendapatkan tambahan alokasi dana kelolaan sebesar Rp850 miliar sehingga total dana kelolaan yang ada pada kami adalah sebesar Rp1,35 triliun. Namun, realisasi pencairan dana kelolaan tersebut baru dapat dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018, karena pertimbangan keuangan negara saat itu.

Sepanjang 2018 LPMUKP telah menggelar layanan pada 210 KKP yang terdiri dari 295 kota kabupaten dengan realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp215,7 miliar untuk 8.475 pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk tahun 2019 LPMUKP telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp182,5 miliar bagi 3.937 pelaku usaha KP pada tahun 210 lokasi layanan pinjaman.

Tayangan berikut ini merupakan rekapitulasi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP sejak mulai operasional pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut BLU LPMUKP telah menyalurkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp409,3 miliar bagi 13.037 pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan distribusi penyaluran, yang pertama untuk sektor perikanan tangkap sebesar Rp144,75 miliar yang diberikan kepada 6.982 pelaku usaha, perikanan budidaya sebesar Rp190,65 miliar bagi 3.916 pelaku usaha. Pengolah dan pemasar hasil perikanan sebesar Rp58,14 miliar bagi 1.775 pelaku usaha. Usaha garam rakyat sebesar Rp12,14 miliar bagi 317 pelaku usaha serta usaha masyarakat pesisir lainnya sebesar Rp3,69 miliar bagi 47 pelaku usaha.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terlihat dari data-data tersebut bahwa nilai rata-rata pinjaman tiap pelaku usaha adalah sebesar Rp31,4 juta. Ini seluruhnya merupakan peta layanan BLU LPMUKP hingga tahun 2019, yaitu pada 210 lokasi layanan pendampingan untuk detail kabupaten kota yang tercakup pada lokasi layanan pendampingan dapat dilihat pada dokumen lampiran di hard copy yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada tahun 2020 BLU LPMUKP merencanakan untuk menyelenggarakan layanan pada 250 lokasi layanan pendampingan, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 210 lokasi. BLU LPMUKP menargetkan untuk dapat melakukan penyaluran pinjaman dana bergulir pada tahun anggaran 2020 tahun ini sebanyak Rp725 miliar dengan target pemanfaatan dana bergulir sebanyak 17.576 pelaku usaha dan proyeksi penciptaan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari pinjaman tersebut sebesar 21.091 orang. Usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya ikan masih menjadi target dominan bagi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP pada tahun 2020.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Saat ini jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berdasarkan data terdaftar pada kartu Kusuka adalah sebanyak kurang lebih 3 juta orang. Estimasi kami sebanyak 2,6 juta pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah lebih kurang 85% dari totalnya. Kami mengharapkan BLU LPMUKP dapat memberikan kontribusi dengan turut mengambil peran dalam pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam

mengisi celah yang saat ini belum dapat diisi oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Dari jumlah pelaku usaha yang ada terdapat 130 ribu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi target sasaran indikatif BLU LPMUKP selama 5 tahun kedepan. Jika rata-rata pinjaman sebesar Rp31 juta, maka untuk dapat memberikan akses permodalan bagi target sasaran indikatif tersebut diperlukan dana kelolaan sebesar Rp4 triliun dengan perhitungan terdapat saldo dana kelolaan pada BLU LPMUKP saat ini sebesar Rp1 triliun masih terdapat kebutuhan tambahan dana kelolaan BLU LPMUKP sebesar Rp3 triliun.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada penutup kali ini ijin kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat armada serta sumber daya manusia pengawasan kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya IUU Fishing di wilayah Indonesia dan mengikutsertakan peran serta masyarakat tradisional pesisir antara lain melalui Pokmaswas.

Terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan Komisi IV DPR RI terhadap KPP dalam upaya memberikan akses pinjaman permodalan, memperkuat tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia serta meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbung kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Dengan demikian harapan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat terwujud. Demikian yang dapat kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal plus Direktur Jenderal.

Ini ada tambahan katanya tayangan film dari lembaga LPMUKP.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Mohon ijin Bapak Ketua, Pimpinan dan Ibu, Bapak Anggota Komisi IV DPR RI. Mohon ijin sedang dipersiapkan pada intinya di dalam film ini kami ingin melaporkan tentang testimoni pernyataan para pelaku usaha yang telah mendapatkan dana kelolaan dari BLU LPMUKP yang tersebar dari beberapa daerah.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, interupsi.

Sebetulnya tayangan ini bagi saya tidak perlu, yang perlu itu sebesar seberapa persenkah, seberapa banyakkah keberhasilannya. Kalau hanya testimoni hanya 5-6 orang, 10 orang itu sama juga omong kosong, tidak ada gunanya, tidak perlu ditayangkan. Saya sebagai Anggota tidak perlu bagi saya, seberapa banyak yang berhasil, seberapa banyak yang tidak berhasil, itu yang lebih penting.

Kemudian disini contoh di Provinsi ini ada 3 kabupaten, tempatnya dimana kan kami juga harus tahu. Apa nama kelompoknya kalau itu ada kelompok. Dan yang paling penting tadi pertanyaan saya belum dijawab, dari 556 kapal pelaku ilegal fishing yang ditenggelamkan ini ditangkap langsung ditenggelamkan atau disidang dulu. Kalau disidang dulu tangkapan tahun berapa. Ini yang saya minta dijelaskan dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ijin, tolong ini dijawab.

Kemudian pertanyaan lagi, kok operasionalnya semakin lama semakin menurun harinya. Kalau memang KPP butuh pesawat kenapa tidak beli kapal pesawat, apa kapal pengawas sekalian kalau memang dibutuhkan, kalau jam operasionalnya banyak. Kalau sudah diatas 200 hari harus beli dong, coba tolong dijawab dulu.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Film disepakati tidak ditayangkan atau ditayangkan?

Tidak usah ditayangkan.

Baik, ketok palu.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya dipersilakan dulu Bapak Dirjen untuk memberikan gambaran umum dan gambaran khusus secara terperinci terhadap apa yang menjadi paparan sehingga ada aspek-aspek kelengkapan yang bersifat data sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sudin yang hari ini berposisi sebagai Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Bapak Ketua, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Mohon ijin saya akan mencoba menjelaskan tentang pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas arahan Bapak Ketua bahwa KPP sudah saatnya untuk bisa memiliki pesawat pengawas sendiri. Untuk itu, kami mohon dukungan agar supaya hal ini bisa kita lakukan secepatnya dan bisa kita tindaklanjuti pada tahun anggaran yang akan datang.

Kemudian yang kedua, terkait dengan jumlah kapal perikanan yang terbukti melakukan ilegal fishing sebanyak 556 kapal tersebut, perlu kami laporkan bahwa 556 kapal yang ditenggelamkan ini statusnya sudah inkrah atau memiliki ketetapan hukum di pengadilan, sehingga tidak ada satu pun kapal yang ditenggelamkan dilaut tanpa melalui proses pengadilan atau inkrah dari keputusan pengadilan.

Selanjutnya, terkait dengan jumlah hari layar atau hari operasi kapal pengawas....

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, jawabannya bagi saya belum terlalu jelas. Yang saya tanyakan tadi fokusnya adalah 556 kapal ini, itu tangkapan tahun berapa saja. Jadi jangan selama 5 tahun tenggelamkan 556, yang nangkap tahun berapa. Kita lihat di bahan ini, wah seolah-olah kapal Tiongkok mencuri ikan di Natuna dimana-mana, yang tertangkap cuma 3 unit bos, ada apa ini? kita lihat juga disini, sementara milik anak bangsa 26 unit ditenggelamkan. Saya mau tahu ini jawabannya apa. Iniloh saya minta penjelasannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, dipersilakan untuk memberikan perincian jawaban. Kapal A ditangkap tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, proses hukumnya inkrah tahun berapa, kemudian ditenggelamkannya tanggal berapa.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Bapak Pimpinan, mohon ijin untuk bisa menjelaskan. Yang pertama, terkait dengan rincian ke 556 kapal, kapan kapal tersebut ditangkap, di ad hoc, kemudian mulai proses pengadilan. Saya mohon ijin Bapak Ketua, seandainya diijinkan kami akan menyampaikannya secara tertulis karena datanya akan lebih rinci seperti yang Bapak Pimpinan samapikan. Kapal A dari negara X, ditangkap pada tanggal sekian, dan dieksekusi penenggalamannya pada tahun sekian, kami akan laporkan.

Namun, yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Bahwa proses hukum rata-rata berlangsung kurang lebih 1 tahun sejak kapal tersebut di ad hoc, sehingga kalau kami boleh menyampaikan ini ilustrasi kami maksimum kapal setelah 2 tahun di adhoc, kemudian diputuskan untuk ditenggelamkan. Kurun waktunya kurang lebih seperti itu Bapak Ketua, saya mohon ijin karena pada kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini kami tidak membawa rincian detail per kapalnya kapan kapal tersebut ditangkap, di daerah perairan mana, kesalahannya apa, kami memiliki semua data lengkapnya Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, dipersilakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bapak saya dari tadi mencoba mengamati terkait proses pemidanaan inikan berarti, 1 tahun itu panjang sekali Pak. Bapak tidak punya gambaran global apa yang mendasari, daerah mana, kapal mana, kita mungkin yang dimaksud rekan-rekan disini adalah bicara gambaran global. Yang menjadi unsur pemidanaannya itu apa, kan begitu. Karena di dalam satu proses peradilan apalagi ini adhoc sampai 1 tahun itu panjang sekali. Begitu loh Pimpinan, maksud saya. Jadi kita minta gambaran global unsurnya apa sampai akhirnya di tenggelamkan. Dan penenggelaman kapal itu ada dasarnya juga, karena misalnya saya pemilik kapal saya akan complain karena tidak ada dasarnya.

Sekian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO M.Sc.):

Terima kasih.

Saya sangat senang apabila kami bisa menjawab secara detail rincian setiap kapal. Saya berjanji untuk hal ini kami akan menyampaikannya kami susulkan. Dan terima kasih atas pertanyaan Ibu, pertama tentu kami perlu melaporkan bahwa kapal-kapal tersebut di adhoc dan dipidanakan melalui pengadilan prosesnya berlangsung di wilayah hukum yang lain bukan di KKP. Kesalahan yang paling utama terjadi adalah menangkap ikan tanpa ijin, ini yang paling sering kita jumpai. Khusus untuk kapal ikan asing bisa kami pastikan mereka menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa ijin menangkap ikan tanpa resmi.

KETUA RAPAT:

Baik, bahwa pihak dari KKP tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci sekarang. Kemudian jawabannya nanti akan diserahkan setelah rapat ini dilaksanakan secara tertulis dan terperinci. Bagaimana Bapak Sudin?

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, saran saya nanti kita bedah pada saat ada Menterinya sajalah, biar kita tahu lihat kinerja KKP ini bagaimana selama ini. Jangan gembar-gembornya seolah-olah wah. Pertanyaan saya yang belum dijawab adalah satu, kapal milik bangsa kita ini 26 ini apa permasalahannya. Hanya ini yang saya mau tanyakan terakhir, setelah itu saya tidak bertanya lagi Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, hanya satu pertanyaan saja yang bisa dijawab, kenapa ada kapal nelayan Indonesia kok yang ditangkap.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO M.Sc.):

Baik, terima kasih.

Dari hasil sidang diketahui secara telak bahwa kapal tersebut beroperasi tanpa dilengkapi surat ijin penangkapan ikan yang resmi. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan jenis alat tangkap yang terlarang. Yang ketiga, umumnya apabila mereka melakukan penangkapan masuk ke jalur I atau jalur 4 mile yang dilakukan oleh kapal berukuran jauh lebih besar dari yang seharusnya diijinkan untuk menangkap ikan di jalur 4 mile laut pertama.

Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, saya ada sedikit lagi pertanyaan.

Kalau perijinannya itu lama itu bukan salah pengusaha, coba ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun lebih tidak keluar. Coba kita periksa, sementara mengajukan ijin harus bayar PHP. Ada yang 8 bulan, ada 10 bulan baru keluar. Dan saya juga nanti yang 26 ini minta perinciannya supaya kita tahu. Jangan menyalahkan seolah-olah pengusaha itu salah, semenjak mantan Ketua Komisi IV DPR RI jadi menteri baru keluar hampir seribu ijin. Nah, selama ini kemana kerjanya, selama ini apa yang dikerjakan.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Masih mau dijawab atau diteruskan?

Teruskan.

Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Ada 3 isu besar menurut saya yang menjadi bahasan kita hari ini, yang pertama adalah peningkatan kapasitas armada KKP sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wilayah kelautan Indonesia. Yang kedua adalah isu Natuna, bahwa isu Natuna itu yang menonjol kemarin itu adalah isu kedaulatan menurut saya bukan isu kedaulatan, itu isu persoalan penangkapan ikan di tempat kita. Jadi bukan urusan pertahanan tetapi persoalan bahwa kita tidak memiliki nelayan yang cukup mumpuni untuk melakukan penangkapan ikan di Natuna, sehingga arah KKP kedepan bila perlu Natunanya penuh oleh nelayan kita yang asli disitu dengan kapal yang memadai, dengan modal yang cukup sehingga wilayah itu tidak menjadi wilayah kosong, kapal orang lain masuk. Kalau dipenuhi dengan nelayan kita dan nelayan kita bisa bersaing dengan kapal Vietnam, kualitasnya di atas kapal Vietnam dan China, saya pikir selesai masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah isu lembaga permodalan yang dikucurkan untuk para nelayan.

Untuk itu, karena isu-isu ini adalah isu-isu menarik, isu seksi dan isu strategis kita mulai dari Anggota kita yang lagi sangat seksi, sangat strategis dan sangat menarik, Ibu Riezky.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kepada jajaran KKP yang hadir, tadi saya minta tolong Pak, mumpung tadi teringat ya. Karena begini, saya teringat tesis teman saya terkait illegal

fishing ini, ini kayak *the unsolved mystery* juga sebenarnya terkait penangana terhadap kapal asing dan kapal lokal. Nah, ini tolong dengan sangat ya Pak, kita kan mau cari solusi supaya lebih baik kedepannya agar KPP bisa prima kedepannya ini harus *clear* Pak, masalah tadi yang disampaikan perijinan dan segala macam. Karena Bapak tidak bisa melakukan diskresi terhadap nelayan apabila memang ada unsur lain dari Kementerian Bapak yang ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan hukum tersebut, itu dulu Pak.

Nah, kemudian saya ini baru tadi malam mendarat dari Kepri Pak. Terus saya bertemu dengan beberapa orang terkait kondisi di wilayah Kepri. Nah, ini sekedar saran atau masukan terkait Satgas 115 yang berada di wilayah sana. Saya apresiasi kepada PSDKP dalam menjaga perairan Natuna. Terutama menjaga sumber daya ikan dari pencurian nelayan asing. Kedua, saya membaca juga ada anggaran untuk Satgas 115 senilai, tolong dikoreksi ya Pak, Rp45 miliar yang buat saya agak *blur* tidak jelas. Sedangkan peran tugas Satgas 115 ini terkait sudah dialihkan ke Bakamla, apakah betul demikian atau tidak mohon juga penjelasannya.

Nah, untuk itu saya mengusulkan kepada Pimpinan dan Anggota, agar anggaran tersebut dimasukkan kepada PSDKP untuk memperkuat armada, teknologi, SDM sehingga dalam menjaga rasa nasionalisme Kang Dedi, kan gitu NKRI harga mati inikan kita begitu, dapat maksimal. Nah, ketiga saya menyarankan PSDKP juga melakukan sosialisasi serta kerja sama yang intens kepada nelayan-nelayan diperbatasan. Karena inikan mata pencaharian mereka juga untuk diperbatasan Indonesia.

Kemudian yang kedua, untuk LPMUKP anggarannya kurang lebih tadi tersirat, tersurat itu 70-an something miliar, untuk dapat memenuhi pelaku usaha perikanan. Saya mengusulkan juga, saya inikan Sumsel sama dengan Bapak Menteri itu. Kalau memungkinkan anggarannya itu ditingkatkan karena manfaat itu juga memang terasa untuk para masyarakat yang berada di daerah perairan mau ikan sungai, mau ikan laut, pokoknya judulnya ikan, kan begitu. Tapi jangan juga hanya digelontorkan tapi tolong didampingi karena masyarakat ini saya dilapangan paham betul digelontorkan doang didampingi tidak, akhirnya sama saja bubar jalan. Nah, karena kan kalau mereka pintar mungkin sudah duduk disini juga. Jadi ya kalau bisa bunganya juga dipertimbangkan juga yang kayak bunga 3% segala macam itu. Jadi teknisnya itu benar-benar konkrit Pak, jangan sampai memberatkan para masyarakat khususnya nelayan.

Itu saja dari saya Pimpinan, semoga kurang adri 3 menit.

*Wabillahii Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi dari gadis seksi, sekarang dari pemuda seksi. Pak Dr. Sutrisno dipersilakan. Ini pemuda tapi tahun 76.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Sekjen, para Direktur dan pedamping.

Mengawali pertanyaan ini saya mau bertanya dulu, langsung dijawab ini. Direktur LPMUKP itu profesinya apa sebelum ini? tolong dijawab dulu.

SEKRETARIS JENDERAL KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO M.Sc.):

Mohon ijin Bapak Ketua, Bapak Sutrisno yang bersangkutan boleh langsung menjawab.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Terima kasih Pak.

Saya sebelumnya itu *micro finance expert* di bank dunia, terus dosen di Fakultas Ekonomi UI, sekaligus staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya akan mengawali pada konteks LPMUKP, Pemerintah sejak merdeka begitu konsen untuk mengangkat kehidupan masyarakat kecil. Kita ingat bagaimana program Dimas, bagaimana program KUD, kemudian Puskud, Inkud, kredit sapi, bahkan juga kepada kredit umum, KMPK, semuanya bermuara kepada kegagalan dan *ending*-nya kepada aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, saya melihat data ini dari mulai tayang tahun 2017 sampai 2019 dapat suntikan dana Rp1,035 triliun. Dalam kurun waktu itu hanya terealisasikan Rp409 miliar, sekitar 30%. Inikan Rapat Dengar Pendapat ini kaitannya kan usulan tambahan modal persoalannya. Kemudian spreading pembiayaannya itu pada perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, garam rakyat dan para petani pesisir.

Dari 5 segmen pembiayaan itu menurut hemat saya yang risikonya agak kecil itu pada perikanan tangkap yang lainnya beresiko tinggi. Bahkan justru yang mungkin bukan pelaku usaha bidang perikanan, para masyarakat pesisir ini juga kredit sampai dengan Rp100 jutaan, rata-rata Rp78 juta yang

lainya Rp20 juta sampai Rp30 juta. Komisi IV DPR RI tugas pokoknya adalah bagaimana produktifitas bisa ditingkatkan, kehidupan rakyat sejahtera, bukan ranahnya untuk membuka-buka masalah usaha, tapi ini ada kaitannya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana perkembangan kredit ini kita hanya akan mengukur produktifitas akan jalan manakala kelancaran kredit itu terbangun. Itu yang perlu disampaikan.

Yang kedua, dari Rp1035 triliun saja selama 3 tahun baru Rp409 miliar, sekarang minta untuk 2020-2024 itu minta tambahan modal sekitar Rp3,5 triliun. Yang kemarin saja dengan rencana 2020 akan membiayai 725 miliar masih cukup dari dana Rp1,035 triliun. Usul saya ad tunda dulu usulan tambahan modal Rp3,5 triliun itu. Kita tunggu bagaimana realisasinya di tahun 2020. Kenapa? Program ini tidak nyata ini, tidak jelas. Yang paling nyata adalah petani garam rakyat itu sudah berkomitmen tidak akan memproduksi garam 2020, tapi ujuk-ujuk disini memprogramka itu, memprogramkan untuk membiayai garam rakyat yang anggarannya Rp101,5 miliar. Ini perlu diketahui Pak dan Ibu, kegagalan Binmas kegagalan KUD, Puskud, Inkud termasuk KIK KMKP justru yang menggagalkan itu adalah para pendamping. Mengatas namakan pelaku usaha di sector itu kenyataannya bukan, sampai-sampai bank pelaksana Bank BRI juga tidak sanggup memproteksinya. Jadi kalau ini di *lost* dan diyakini akan sama dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya.

Kemudian di sektor *illegal fishing* kita juga perlu menyamakan pemahaman dulu. Berbagai pendapat tadi sudah disampaikan sama Pimpinan, bahwa seolah-olah persoalan Natuna ini persoalan gangguan pada kedaulatan. Pada hakekatnya inikan persoalan asset kekayaan kita diambil orang. Oleh karena itu, menurut hemat saya solusi utama yang harus dilakukan adalah bagaimana Pemerintah melakukan penegakan hukum secara konsisten, mempercepat proses pengadilan adhoc itu tidak bertahun-tahun, agar segera ada keputusan.

Kemudian upaya untuk menghadirkan para nelayan dari luar, saya kemarin baru dari nelayan di Subak Belanakan. Sampai-sampai Ketua Kelompok Nelayan ngomongnya gini, "musuh saya adalah Pemerintah, NKRI sudah bubar", sampai seperti itu. Kenapa? Dia suruh ke Natuna peralatan sudah dilengkapi akan tetapi tetap disalahkan. Bahkan pada saat ada ikan tidak bisa diambil suruh ke Natuna, di Natuna tidak ada ikan. Mungkin diantara yang 26 yang ditenggelamkan itu mereka sampai bersikap seperti itu. Itu rakyat kita, salah kayak apapun juga itu adalah rakyat kita, kenapa tidak dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Ujuk-ujuk langsung ditenggelamkan, bagaimana Sila yang kedua, Sila perikemanusiaan, sila keadilan sosial, sila kerakyatan. Saya kira ini perlu lebih cermat dalam mensikapi persoalan membedakan antara anak bangsa dengan orang-orang dari luar negeri kita.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kalau urusan ditenggelamkan tidak apa-apa kalau kapal asing, biar dia tidak mencuri lagi.

Baik, kalau kita boleh memberikan gambaran umum. Inikan problem kita secara umum, hampir seluruh kredit baik tani maupun nelayan rata-rata memang para petani dan nelayanya tidak menikmati, paling tinggi yang menikmati Ketua Kelompok yang bisa bikin proposal, yang bisa melakukan pengajuan. Karena petani secara umum, nelayan secara umum tidak punya akses untuk itu. Ini gambaran umum saja, mudah-mudahan kredit ini juga nanti tidak menjadi kredit yang untuk para ketua kelompok nelayan yang bisa proposal dan rata-rata aktivis organisasi itu secara umum.

Nah, selanjutnya untuk itu diperlukan orang-orang yang senantiasa mengabdikan kepada Allah secara baik, agar ada keikhlasan dalam melayani masyarakat. Dan yang mengabdikan kepada Allah Anggota DPR RI itu adalah Komisi IV DPR RI, namanya Bapak Abdullah, karena Abdullah itu artinya mengabdikan kepada Allah. Dipersilakan mana Bapak Abdullah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Sekjen, para Direktur beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karena yang hadir hari ini adalah Dirjen Pengawasan, saya focus saja untuk pengawasan. Jadi kalau untuk peningkatan-peningkatan lain apa penambahan itu nanti Dirjennya Tangkap.

Bapak Dirjen, saya kira potensi wilayah negara Indonesia cukup luas. Kunci ada pada pengawasan, pengawasan itu yang bisa merubah semua. Salah satu contoh yang ada di daerah kita, mungkin juga ada di daerah-daerah lain soal illegal fishing. Tadi disampaikan Bapak Dirjen bahwa ada peningkatan kualitasnya, peningkatan sumber daya manusia, jumlah dan lain-lain, infrastruktur dan lain-lain. Saya cuma usul saja untuk agar menjadi perhatian. Kalau di Maluku itu potensi jelas, 4 ribu sekian ton per tahun yang kemarin saya katakan dari sumber daya ikan yang ada di Indonesia sekitar 12 juta ton. Maluku 4 ribu sekian itu sekitar dia tas 30%, kalau 4 juta, kalau kita kelola dengan baik saya kira ini potensi yang sangat cukup bagus. Saya kira di Natuna juga perlu tapi saya kira Maluku juga perlu ada perhatian.

Kalau soal pengawasan itu aparat yang ada disana untuk Maluku kurang lebih sekitar 11 orang, padahal kita butuh kurang lebih 60 orang. Seram, Banda dan sampai di Ternate itu kalau tidak salah cuma 3 orang. Bagaimana 3 orang itu mau mengawasi wilayah yang begini luas. Untuk itu,

permintaan dari saya itu agar kita jeli untuk melihat ini agar potensi pengawasan itu jelas.

Yang kedua, soal kapal pengawas. Maluku itu kalau tidak salah ada di Tual, ada di Ambon, ada di Banda, kapasitasnya kecil. Kalau gelombang sudah tidak bisa berfungsi sebagai pengawasan. Cuma ada satu, ada satu kalau tidak salah panjangnya sekitar 30-an sekian meter itu Maluku, sebagian Maluku, dan sebagian Maluku Utara. Apakah mampu? Untuk itu saya usulkan kalau bisa ada tambah 1 kapal yang kapasitasnya besar, kalau bisa diatas 40, panjangnya di atas 40 meter. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian.

Lalu yang kedua, ini soal juga pengawasan. Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saya kira sangat cukup banyak. Dulu waktu jaman saya jadi Bupati itu ada bantuan 15 PK 40 PK. Saya sibuk itu bagaimana cara ada pemutihan, saya kira ini mungkin juga ceritanya sama. Saya usulkan saja kita harus jeli dari pengawasan itu apa yang terjadi di bawah itu menjadi perencanaan kita yang jelas.

Yang ketiga, inikan katanya dana bergulir, Maluku itu kalau tidak salah ada 8 kabupaten kota tapi tim pendampingnya Cuma 3 orang. Bagaimana caranya dia harus menangkap sekian ribu orang, ini juga agak sulit. Untuk itu, kalau ada satu perencanaan saya kira SDM-nya ini harus kita siapkan. Yang lain, inikan tadi dananya bergulir, 2016-2017 sekarang sudah 2020 kalau dikatakan bergulir itu berarti dari 1 pengusaha targetnya berapa persen itu dia mengeluarkan dalam sekian tahun dan bergulir untuk siapa. Kalau Cuma namanya bergulir terus itu sampai sekian tahun kita tidak punya target, kan kata bergulir kalau umpamanya saya salah tapi kalau benar. Sekarang kalau bergulir sekian banyak triliun untuk sekian orang itu maka dalam sekian tahun apakah bergulir tahun pertama ini bisa selesai tidak untuk bergulir berikut, jangan sampai ada penambahan-penambahan dia bergulir terus.

Saya kira untuk Bapak Dirjen saya kira kegiatan kesuksesan semua program yang ada di Kelautan itu ada di pengawasan. Mungkin yang terakhir, yang saya terakhir pekerjaan-pekerjaan saya kira tidak perlu, tapi yang penting sekali soal moratorium ada di Banda. Di sana kan penangkapan ikan tuna sirip kuning, kalau pengawasan itu jelas itu maka tidak boleh ada satu ekor pun tuna sirip kuning yang harus keluar dari Banda. Tapi nyatanya kan keluar terus ini banyak pengusaha itu disana itu caranya ekor kuning, namanya ikan loin dan tuna dari sana. Dan ini juga sangat menyusahakan masyarakat, kalau memang kita tidak mampu untuk adakan pengawasan dan merugikan masyarakat, usulan saya itu ada moratorium di Banda ini dicabut, karena apa? Saya kira moratorium inikan hanya menyusahakan masyarakat dan tidak ada gunanya Bapak Pimpinan. Jadi moratorium ikan tuna ini, itu ikan tuna pada saat Oktober sampai Desember bertelur di Banda, lalu dilarang untuk itu, padahal di bulan-bulan itu, itu adalah potensi hasil yang dinikmati oleh masyarakat. Maksud saya kalau memang kita tidak dapat melaksanakan pengawasan dan ini merugikan masyarakat moratorium dicabut saja. Kalau tidak nanti saya jadi pengawas disana, kalau ada satu ekor sirip kuning keluar maka itu saya harus beritahu Pimpinan. Biar kita jelas jangan sampai ada atur-aturan tetapi ini malah merusak masyarakat.

Saya ini usul saja dari pengawasan kita akan selalu kordinasi dan saya akan selalu kordinasi karena Maluku itu adaa 4 juta ton per tahun. Kok kita bicara kan yang lain tapi kok Maluku tidak kita support sarana dan prasarana. Saya sudah pernah usulkan Bapak Pimpinan.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas pengabdianya, karena ucapan-ucapannya ucapan mengabdikan sebagai Anggota DPR RI kepada Allah. Dan orang-orang yang mengabdikan itu pasti memiliki hati yang bersih dan hidup yang senantiasa konsisten. Dan hati itu namanya Budhy, nah ini konsisten itu setia, ini ada Budhy Setiawan, ini nama-namanya bermakna, sekarang Bapak Budhy Setiawan. Tenang saja habis itu terjemahkan namanya masing-masing.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Kom IV DPR RI yang saya hormati,
Dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertama, menyangkut soal praktek illegal fishing *unreport* sama *unregulated*. Pertama, mengenai paparan yang Bapak sampaikan, kita di DPR RI ini bicara kebijakan. Jadi saya sarankan kepada Bapak, kalau kita bicara mengenai namanya sebuah permasalahan bedah dulu dari kebijakannya Pak. Masalah apa yang Bapak sampaikan disini terutama soal Nias, Bapak kaitkan dengan *over fishing*. *Over fishing* itu Pak, lebih erat kaitannya dengan tehnik penangkapan yang memang tidak memperhatikan keberlanjutan dari ekosistem yang ada. Ini kita bicara soal penangkapan illegal tidak mau ikut aturan, jadi kaitannya lebih dekat kepada efektifitas, efisiensi dan transparansi perijinan Pak. Kenapa orang itu mau melakukan kegiatan illegal? Jadi saya sepakat dengan Bapak Sudin, saya ingin data mengenai efisiensi perijinan berapa kapal yang mengajukan ijin. Kalau perlu Pak lebih detail lagi di setiap wilayah *catchment area* tersebut Pak. Kemudian berapa yang diberikan ijin, kemudian yang tidak diberikan ijin apa sebabnya, ini menyangkut kebijakan Pak. Nah, kemudian transparansinya Pak, transparansi perijinan ini sejauhmana memang diberikan informasi yang transparan terhadap pengaju-pengaju ijin. Saya ingin berarti kalau transparansi berarti dari lama durasi pengurusan perijinan, semakin lama semakin tidak transparan Pak. Saya ingin ada datanya itu Pak, berapa lama pengurusannya masing-masing perijinan tersebut. Berikutnya Pak, berapa kelembagaan, berapa instansi yang mengurus perijinan ini. KKP mengurus perijinan apa, pihak TNI AL mengurus perijinan apa, ini berapa perijinan lembaga yang mengurus ini. Semakin banyak

semakin tidak efisien Pak. Data ini ingin saya dapatkan memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Sudin. Itu menyangkut soal praktek illegal fishing.

Menyangkut soal LPMUKP, LPMUKP ini saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Jadi kita bicara dulu tentang efektifitas LPMUKP ini sebelum Bapak minta nambah dana menjadi Rp3 triliun tadi Pak. Karena kalau untuk sekelas BLU Pak, penyaluran Bapak punya modal Rp1,3 triliun penyaluran baru sampai di angka Rp400 miliar. Ini terlalu prudent Pak, untuk sekelas BLU Pak, karena pihak Bank saja yang sangat prudent itu berani memberikan penyaluran kredit itu ke angka 70% berani Pak, malah lebih berani lagi dari 70% karena memang cari duit Pak, bank itu dari situ Pak. Sekelas BLU terlalu prudent ini Pak. Jadi ini terlalu konvensional Pak, kinerjanya BLU. Maka saya ingin ada informasi data mengenai bagaimana detail dari penyaluran kredit LPMUKP ini Pak. Persyaratannya seperti apa, saya perlu tahu Pak. Kemudian yang disebut apa namanya oleh komite peminjam diberikan persetujuan itu atas dasar apa indicator-indikatornya apa Pak.

Nah, karena kita bicara efektif dulu Pak, sebelum kita nambah-nambah modal LPMUKP ini berapa tingkat pengembalian yang sudah itu setiap tahun, tingkat pengembaliannya bagaimana, apakah ada yang menunggak, berapa tingkat penunggakannya. Nah, lain kali Pak, kalau bicara soal kebijakan seperti ini kita bicara kebijakan dulu Pak, baru ke hal-hal yang sifatnya teknis. Begitu pun LPMUKP Pak, bicara dulu soal efektifitas baru kita bicara soal penambahan Pak. Nah, ini agar transparansi dalam Bapak memberikan paparan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Budhy ini orang yang setia dan yang paling setia pada profesi adalah pelaut dan para petani. Cuma ada dua hal yang berbeda, kalau pelaut dengar guntur itu takut, kalau petani dengar guntur tanda-tanda mulainya kemakmuran. Dan kita akan mendengarkan Guntur secara bersama-sama hari ini.

F-PD (GUNTUR SASONO):

Terima kasih Ketua.

Ketua ini memang mantap.

Pimpinan yang saya hormati,
Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Dan Bapak Dirjen dengan segenap jajarannya.

Yang pertama, kami ingin mengingatkan peranan KKP dalam kondisi-kondisi Natuna akhir-akhir ini. Karena kita punya kedaulatan jangan sampai pula kita tidak berdaulat di wilayah Natuna. Pertama, yang menyangkut KKP

adalah peranan-peranan illegal fishing, kemudian juga yang terakhir sandera daripada nelayan-nelayan kita, yang terakhir pula ditambah Corona, saya kira ini jauh tapi semuanya ini peranan KKP sangat besar di wilayah Natuna, sehingga integritas bangsa kita harapkan lebih baik dari adanya KKP ini.

Yang kedua Pak, saya melihat dari sisi lembaga pengelolaan modal usaha. Saya dari Dapil VIII, saya melihat banyak kemajuan di wilayah Nganjuk, Jombang, yang diharapkan ini terus akan banyak bantuan dari KKP. Namun, satu sisi saya melihat dari kebijakan ini untuk Provinsi Jawa Timur, 4 wilayah yang menjadi tanggungjawab kami dipilih dari sana belum ada sama sekali Pak, Madiun, Jombang, Nganjuk dan Mojokerto. Kami mohon sebagai evaluasi kami, apakah ada kegagalan di rakyat-rakyat kami itu atau memang belum terpantau karena ini menjadi tanggungjawab moral kami ada 4 orang Anggota DPR RI ini yang ada di Dapil tersebut Pak, saya, Bapak Mindo, Bapak Mutarom dan Mbak Ema. Mereka akan dituntut semuanya karena yang lain-lain dapat kok menjadi terbengkalakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Guntur.

Ternyata suaranya tidak terlalu menggelegar sebagaimana kita takuti, cukup lembut. Nah, kelembutanya ini karena ada savanna di Nusa Tenggara, savanna ini ada pemuda yang kelihatan tampan, kelihatan ganteng, pakai kacamata. Dipersilakan Bapak Hansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan, Kang Dedi terima kasih.

Bapak dan Ibu Anggota Kom IV DPR RI yang saya kasihi, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan jajaran KKP yang saya hormati.

Bicara soal pencurian ikan atau illegal fishing ini tidak bisa kita pisahkan dari aspek kedaulatan kita di laut Pak. Saya akan memulai dengan sebuah hipotesis, kalau pencurian ikan masih banyak terjadi artinya di laut kita itu belum berdaulat. Karena itu, politik laut terkait dengan kedaulatan kita itu yang pertama harus kita bereskan Pak. Jadi aspek security di laut, aspek security maritime itu harus menjadi perhatian utama kita. Pertanyaannya adalah apakah kedaulatan kita di laut itu semata menjadi tugas dan tanggungjawab KKP? Tentu tidak. Di sana ada TNI Angkatan Laut, disana ada Bakamla, ada Pol Air dan seterusnya. Karena itu, menurut saya kalau kita mau bicara membereskan masalah illegal fishing, pertama kita harus memastikan bahwa di laut kita itu berdaulat. Dengan berdaulat tidak akan ada pencurian Pak. Nah, ini prolem kita yang mendasar.

Yang kedua, kalau saya baca dari segi anggaran. Saya berani menyimpulkan bahwa besaran anggaran pun belum berkorelasi positif

terhadap kinerja dan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh KKP. Saya tidak tahu apakah anggarannya kurang ataukah kinerjanya yang belum optimal. Tetapi point saya adalah terkait dengan pengawasan terhadap pencurian ikan ini ada dua kata kunci yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bekerja harus targeted, harus terencana baik, informasi cukup terutama terhadap wilayah perairan kita yang rawan pencurian ikan, dan jangan bekerja secara spekulatif. Kata kunci yang kedua ya harus integrated, kita jangan hanya bicara soal aspek penindakan tetapi juga perlu pencegahan Pak. Nah, terkait dengan pencegahan ini tadi Pimpinan sudah mengatakan saya ambil analogi kalau rumah itu kosong Pak, itu rentan terhadap pencurian, begitu juga laut. Kalau laut kita itu tidak ada nelayannya, tidak ada aktifitasnya disitu, maka dorongan untuk melakukan pencurian ikan itu akan besar. Karena itu, mungkin langkah sederhana yang harus kita lakukan adalah memperbanyak armada perikanan kita di laut-laut yang sebenarnya punya kekayaan ikan banyak tetapi mungkin sepi Pak.

Yang berikut, saya juga mau bicara soal security ujungnya, nah ini terkait dengan KKP. Harus ada dimensi prosperity-nya buat para nelayan kita Pak. Dan hal yang juga tidak boleh kita lupakan adalah diplomasi maritime, terutama diplomasi kita dengan negara-negara yang kita tengarai sebagai pelaku pencuri ikan ini Pak. Karena itu memang pendekatannya ini, pendekatannya komprehensif, tidak bisa hanya KKP. Karena dasarnya menurut saya itu adalah di kedaulatan, kalau kita berdaulatan orang tidak mungkin masuk rumah kita. Memang tidak ada teritori kita yang dipindah tetapi begitu dia masuk itu menunjukkan bahwa kita tidak berdaulatan. Dan itu bukan Cuma kerja KKP menurut saya.

Yang berikut Pak, sedikit keluar dari saya melihat kekayaan laut kita ini melimpah tetapi sector kelautan dan industry perikanan kita relative belum memberikan kontribusi yang besar Pak. Dan penyebabnya bukan sekedar illegal fishing Pak, tetapi pertanyaan saya apakah korporasi-korporasi yang bergerak disektor perikanan itu sebenarnya sudah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara atau belum. Karena saya baca data tahun 2017 Pak, itu ada korporasi yang nakal juga sebenarnya. Untungnya sekian, tetapi penerimaan untuk negara itu jauh di bawah itu. Jangan sampai ada manipulasi laporan, nah ini juga bagian dari kerja penindakan KKP yang harus diperhatikan.

Yang terakhir soal dukungan perbankan nasional. Kesannya masih sangat minim Pak, artinya perbankan ini belum melihat sector kelautan ini menjadi sesuatu sector yang potensial. Nah, saya ingin tanya upaya konkrit dari kementerian Bapak, langkah strategis, langkah yang terukur, sistematis untuk meyakinkan perbankan ini seperti apa Pak. PR besar kita adalah kalau Bapak Jokowi bicara poros maritim dunia, mestinya laut kita ini menjadi ruang hidup dan sumber hidup buat bangsa dan negara kita.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih masih terus bicara kelautan hari ini.

Setiap orang itu punya keinginan, keinginannya ingin diwujudkan, China itu tidak memiliki Tuhan tetapi doanya dalam bentuk usahanya lebih nyata sampai nelayannya pun di kawal oleh para penjaga pantainya dan masuk ke tempat kita. Pertanyaannya kita berani tidak ke tempat lain seperti itu? Pasti tidak berani. Jagain di tempat kita saja rasa takutnya ada dengan berbagai pikiran, apalagi masuk ke rumah orang.

Nah, kita ini lengkap sebenarnya kalau dua-duanya dijalankan. Satu, politik anggaran agar tepat sasaran belanjanya. Kemudian yang kedua adalah doa dalam setiap saat kita panjatkan agar nelayan kita kuat, kuat modalnya, kuat perkapalannya, kuat teknologinya dan kuat penjagaannya dari negara. Dan ijin kita juga harus hati-hati, bisa jadi ijin yang diberikan itu tidak digunakan oleh kapal kita bisa jadi juga ijinnya digeser lagi, dijual lagi ke tempat lain, bisa jadi ya, saya tidak tahu, KKP lebih tahu tentang itu. Agar doa kita ini tepat didukung oleh Komisi IV DPR RI ada yang lebih pas untuk menyampaikan. Pak Ibnu Multazam urusan doa.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Ketua.

Ketua, Pimpinan yang sangat bijaksana yang saya hormati, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Bapak Sekjen sekaligus Plt. PSDKP yang saya hormati.

Saya hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam mengawasi laut saya teringat tahun 2017-2018 itu kita menganggarkan surveillance. Pasti itu diawali dari surveillance itu, karena melalui surveillance kan itu bisa mendeteksi kapal asing yang masuk perairan Indonesia ataupun kapal-kapal yang melakukan transshipment dalam arti negative, transshipment keluar negeri, kalau transshipment ke dalam negeri artinya positif. Saya bertanya apakah war room dalam hal ini disebutkan surveillance itu masih berjalan efektif atau tidak di KKP.

Yang kedua, apakah surveillance itu ter-connect dengan Angkatan Laut, dengan Pol Airut atau Bakamla. Karena kan hari layar kapal pengawas kita terbatas, apalagi 2020 itu kan Cuma 150 hari, hari operasi kapal pengawas, hari operasi airborne surveillance itu 150, hari operasi speedboat itu 50. Nah, di tengah-tengah kekosongan itu kita kalau ada kapal asing masuk ke perairan Indonesia itu memberi sinyal kepada pihak lain seperti Angkatan Laut dan lain sebagainya karena kapal kita mungkin tidak bisa berlayar karena bukan hari layarnya itu untuk memberitahu bahwa di sana dikordinat sekian ada kapal asing masuk.

Yang kedua, pencurian ikan di laut itu kan sering terjadi bulan Desember, bulan Januari. Seperti kasus Natuna kemarin kan bulan

Desember, bulan Januari. Itu mereka kira-kira tahu mekanisme APBN kita bahwa Desember itu sudah tutup anggaran tanggal 24, sedangkan Januari itu belum mulai anggaran baru. Nah, itu kira-kira sedang kosong-kosongnya pengawasannya kita sedang kendor-kendornya. Untuk itu, kalau dimungkinkan KKP mempunyai dana cadangan untuk mengisi kekosongan hari layar, sebab kalau tidak ada dana cadangan yang digunakan untuk itu, itu harinya kosong dan ditempat-tempat lain juga Angkatan Laut juga kosong, di Pol Airut juga kosong, nah ini mencurinya mudah.

Selanjutnya, Satgas. Satgas inikan masa tugasnya sudah habis tetapi di 2020 ini direncanakan anggaran Rp45 miliar. Itu untuk apa wong masa tugasnya habis kok ada anggaran Rp45 miliar. Itu kalau sebelum apa namanya itu dialihkan saja untuk menambah hari layar. Jadi Pimpinan, itu sebaiknya dialihkan saja untuk menambah hari layar kalau itu memungkinkan karena tugasnya Satgas itukan apa benar sudah habis, belum ada SK baru.

Selanjutnya, sewa pesawat. Ini tadi nyambung Pak Sudin daripada untuk nyewa pesawat ya pelan-pelan untuk anggaran 2021 coba usul beli pesawatlah, supaya ini lebih efisien. Ini Bapak Firman ini sudah menangkap apa yang saya bicarakan ini, karena ini orang yang cerdas sekali. Yang selanjutnya, itu kapal dalam negeri, kapal Indonesia itu saya setuju untuk dilakukan pembinaan dulu. Paling ini biasanya ya melanggar ijin, terus melanggar wilayah tangkap, dan alat tangkap itu sebaiknya dilakukan pembinaan dulu jangan sampai kita katakan menenggelamkan kapal sendiri.

Terus terakhir, saya baru mengenal ini tentang LPMUKP, saya baru dengar, baru tahu rapat ini. Saya ingin bertanya itu eselon berapa yang menduduki LPMUKP. Kalau itu eselon berarti kan di bawah KKP, kalau itu bukan eselon seragamnya kok sama KKP. Nah, untuk itu kalau eselon menjadi bagian dari yang dilaporkan KKP kepada Komisi, misalnya kalau itu tadi menyalurkan modal usaha ya ada neraca yang bisa dilihat oleh Bapak Ichsan Firdaus ini kira-kira neracanya defisit apa surplus. Kan ini yang disalurkan kan Cuma menyalurkan modal usaha saja, dan itu modalnya dari mana, apakah itu juga dari PMN yang lewat KKP atau modalnya sendiri. Ini nanti saya ingin penjelasan ini eselon di dalam KKP apa bukan itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Jadi kita ini berdoanya rupakanya kalau Multazam kan dinding Ka'bah. Kita ini berdoanya harus dinding anggaran sehingga Januari tidak kekosongan, bisa GU dulu di tanggal 2 langsung GU.

Silakan Pak, interupsi apa, Bapak belum interupsi sudah saya persilakan untuk interupsi Pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya hanya mau satu menit saja.

Tentang pengawasan ini Pak, apakah dalam rangka pengawasan itu terutama mengawasi kapal dari luar. Apakah ada perlengkapan khusus bagi kapal-kapal kecil kita sehingga dia bahagian dari KKP juga untuk mengawasi. Saya pikir nelayan-nelayan kalau ada yang mau mengganggu daerah dia mau direbut oleh asing mesti dia mau melawan tetapi dia tidak mampu. Dia harus melaporkan kepada siapa, dia melaporkan KP, ada tidak ada alat itu. Nah, untuk menguji adakah alat itu atau tidak ada alat itu apakah di setiap titik di laut itu, laut penangkapan itu nelayan bisa telepon kerumahnya, bisa video call kerumahnya. Kalau itu bisa dilakukan itu sangat membantu pengawasan Pak. Itu satu.

Yang kedua, tadi dalam rangka BLU tadi coba saya ingin tahu datanya direncanakan untuk berkaitan dengan tangkap itu berapa, dengan budidaya itu berapa. Budidaya dibagi dua, budidaya di laut berapa, budidaya di darat itu berapa.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Suhardi.

KETUA RAPAT:

Ya, sekarang Bapak Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya?

KETUA RAPAT:

Iya, jangan dulu interupsi Pak.

Baik, terima kasih.

Jadi seringkali nelayan itu ditanya besok dapat ikan apa tidak, itu jawabannya Duka kata orang Sunda. Duka itu ada dua, satu duka itu mengucapkan belasungkawa, duka itu jawaban orang sunda ketika nasibnya besok bagaimana.

Silakan Bapak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Dan Sekjen bersama dengan Eselon yang lainnya.

Sebenarnya kalau kita selalu melakukan pendekatan pengamanan itu tidak bijak dan bahkan tidak produktif pendekatan pengamanan itu. Satu laut Indonesia mau diamankan oleh KKP dan saya kira tidak efektif dan juga setelah aman itu laut itu buat apa, tidak ada manfaat juga. Yang kita butuhkan adalah hasil laut itu ditangkap, diambil ikannya, diekspor, kemudian dikasih makan masyarakat, rakyat, akhirnya tidak stunting dan lain sebagainya. Tapi kalau diamankan terus tidak ditangkap buat apa, apalagi menghabiskan anggaran Rp1,1 triliun, dibandingkan dengan hasil yang didapat. Oleh karena itu, pendekatan keamanan saya kurang setuju. Saya lebih setuju adalah penguatan nelayan, bagaimana nelayan kita berdayakan, kita percepat ijinnya, jangan kasih ijin yang hanya 100 GT kebawah, kalau perlu kasih 300 GT sampai 500 GT keatas, supaya potensi ikan kita bisa ditangkap, kasih rumpon dan lain sebagainya.

Tahun 1989 saya Ketua AMPI Pak, saya dipanggil oleh Panglima Pangdam, saya dikasih rumput laut untuk dikasih oleh orang yang ada dipesisir, waktu itu rumput laut belum ada. Saya katakan siapa yang mau beli nanti Pak? Pak Panglima yang beli. Sesungguhnya tujuan Pak Panglima bukan untuk ekonomi, tapi agar masyarakat dipesisir itu menjaga penyelundupan agar jangan dijadikan untuk tempat penyelundupan senjata, penyelundupan yang lainnya dipesisir itu. Oleh karena itu, kasih rakyat yang mengamankan laut kita. Kalau rakyat merasa butuh disitu, punya kemampuan untuk mengambil ikan pasti dia lawan-lawan nelayan-nelayan yang lain. Tapi kalau rakyat kita tidak butuh, tidak mampu untuk mengambil ikan dengan ketidak berdayaannya saya pikir ini tidak ada gunanya kita melakukan pengamanan laut tanpa produktifitas. Oleh karena itu, kalau kita menghitung berapa uang dikasih keluar aman, berapa yang kita bisa tangkap saya kira itu juga perlu kajian.

Yang kedua adalah BLU, tadi ini dalam butuh Rp750 miliar dibanding dengan pengamanan tadi Rp1,1 triliun. Justru ini yang perlu disupport agar masyarakat kita lebih mudah untuk berproduktifitas. Dengan ketentuan objeknya itu perorangan, kalau namanya kredit perorangan Pak, jangan bikin kelompok-kelompok. Karena dia juga nanti berani untuk tidak bayar kembali, semakin satu tambah satu, lima orang tambah berani itu, "wah, sama-sama dipenjara kita nanti". Jadi lebih bagus tanggungjawab individu sehingga itu kembali, "kalau kau tidak kembalikan dipenjara kau nantinya", takut dia itu, tapi kalau berkelompok dia berani untuk tidak membayar. Dan salah satu yang saya usulkan untuk pendampingan di Sulawesi Barat kalau mau tunjuk pendampingan dan ini sudah teruji di UNICEP dan lain sebagainya tunjuk LSM Karang Puang, aman uang Bapak, orangnya jujur.

Terakhir adalah objek untuk BLU itu, ada berapa objek tadi saya lihat, ada satu di dalam, yaitu rumput laut. Petani rumput laut Pak, penting mereka ini dia butuh kredit untuk tali, dia butuh kredit bibit, dan dia panen, tanpa dua itu tidak bisa dia panen. Dan yang paling terakhir adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Barat Dapil saya Pak, potensinya 500 ribu ton per bulan, sepanjang 700 KM. Coba Bapak lihat selama 5 tahun apa yang Bapak berikan Sulawesi Barat? Tidak ada. Saat ini kemampuan nelayan Sulawesi Barat baru mampu 50 ribu ton setiap bulan, masih sangat jauh dari potensi dengan tingkat produktifitas yang ada. Oleh karena itu, butuh supporting dari Bapak dari KKP.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Pas interupsi, pas diberi kesempatan, ini rezekinya paling bagus ini. Tetapi nelayan itu keindahannya dapatnya di malam hari, biasanya rezekinya ngitung bintang. Tapi hari ini jangan ngitung bintang, ngitung bulan deh, karena bulan juga indah tetapi juga tidak indah kalau tidak cocok datangnya.

Terima kasih.

Tidak ada? Kemana Wulan? Usul tidak ada, ya sudah Banggar. Baik, silakan.

Kemudian selanjutnya selama ini yang digemborkan oleh kita semuanya adalah laut terjaga, agar hidupnya senantiasa terjaga dan keterjagaan laut itu bisa diterjemahkan oleh Ibu Farida Hayati, artinya kan menjaga untuk hidup selamanya, walaupun Farid itu artinya sendiri.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Bisa saja ini Pak Pimpinan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang berbahagia,
Serta selamat datang Sekjen KKP dan jajarannya.

Menindaklanjuti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah lebih dulu. Mungkin ini terkait dengan permodalan, memang masyarakat khususnya nelayan ini terkendala dengan agunan. Seberapa pun besarnya, seberapa pun nilai kapal itu miliaran apa pun, itu tidak dapat digunakan sebagai agunan. Nah, ini yang akan sangat bikin masyarakat ini, nelayan khususnya termaginalkan. Apa tidak ada dari Kementerian dengan perbankan nasional untuk komunikasi bahwa laut kita ini sangat luas sekali. Saya yakin kalau ada komunikasi antara KKP dengan perbankan saya yakin tidak hanya KUR, KUR inikan sangat kecil yang diperoleh oleh nelayan. Jadi misalnya kebutuhannya nelayan ini katakanlah 500 juta, kalau KUR itu biasanya hanya bisa memberi Rp100 juta, nah Rp400 juta ini dapat darimana untuk mensupport kegiatan nelayan. Maka saya penting untuk support dari KKP terkait dengan agunan. Jadi kapal pun harga miliaran pun tidak bisa digunakan sebagai agunan. Nah, ini yang sangat menjerit di masyarakat di bawah.

Terus terkait dengan ini tadi saya di Dapil kebetulan saya Dapil Tuban, Bojonegoro. Dapil Tuban ini masuk di UPP Berondong yang meliputi Tuban, Lamongan dan Pacitan. Ini banyak keluhan dari masyarakat nelayan terkait dengan Pass untuk GT di bawah 7. Jadi GT 1 sampai 6 itu sangat-sangat lambat sekali terkait dengan perijinan Pass. Jadi dari 2015 sampai 2020 untuk wilayah Tuban yang diajukan adalah 3.161 itu baru 919 yang akan melakukan pendaftaran di dalam minggu depan ini. Maka saya membayangkan kalau sekarang masyarakat sudah mengikuti prosedur dari 2015 sampai 2020 ini sangat lambat sekali Pak. Itu nelayan kecil Pak, kalau GT 1-6 itu. Bagaimana nanti kalau nelayan seharusnya mereka membawa 1 juta katakanlah yang akan dibawa pulang gitu kan, tetapi karena ditangkap oleh Polisi Air akhirnya berkuranglah, karena bagaimana pun mereka juga ingin makan, kan seperti itu. Maka saya berharap tolong didorong untuk percepatan penerbitan Pass.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Semoga laut kita laut yang abadi, laut yang hidup seluruhnya, karena ikan makan plankton terus berputar tidak ada satu yang dibunuh. Dan sehingga keichsanan kita ini bukan hanya salat tetap berhidup sosial. Tapi

Ichsan tidak ada, ini sudah ngajuin. Nah, kalau lautnya senantiasa terjaga *insya allah* hidup kita selamat.

Pak Slamet silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Terima kasih Pimpinan Bapak Dedi.

Cocok jadi dalang Bapak Bupati.

Yang saya hormati mitra kerja dari KKP dan seluruh jajaran.

Ada beberapa ingin pendalaman saja terkait dengan itu, bahwa nampaknya nasib nelayan kita, kalau dari data tidak beda jauh dengan petani kita. Artinya setiap tahun jumlah masyarakat atau rakyat kita terus menurun, tentunya penurunan ini klasik bahwa memang tidak ada jaminan dan Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan bahwa kalau menjadi nelayan akan sejahtera, sehingga berbondong-bondong generasi muda tidak akan ada yang mau untuk kemudian mengambil profesi yang sebenarnya profesi mulia, sehingga pertanyaan saya kepada Pemerintah program apa, langkah-langkah strategis apa dalam rangka kemudian mengembalikan kepada generasi muda bahwa memang jadi nelayan ini menjadi kebanggaan profesi yang membanggakan. Karena ini data ini kalau tidak kita seriusi Pemerintah, maka ke depan potensi yang ada di negara kita akan praktis kemudian yang memanfaatkan secara SDM adalah seluruhnya bahasa saya, kalau hari ini kita impor kita nanti itu yang menangkap ikan juga kita impor, jadi nelayannya yang akan kita impor ke Indonesia. Karena sudah tidak ada lagi rakyat kita yang menjadi mengambil profesi ini. Nah, ini menjadi keprihatinan kita yang juga harus menjadi keseriusan menjadi program Pemerintah, sehingga saya ingin mendapatkan gambaran itu.

Yang kedua, terkait dengan tadi disampaikan saya juga ingin mendapatkan gambaran *flow chart* terkait dengan perijinan. Ketika kemudian ada penangkapan atau kapal-kapal yang dianggap ada permasalahan terkait perijinan masalahnya apakah memang dia tidak mengurus ijin atau ijinnya yang berbelit-belit atau memang dipersulit, sehingga ingin mendapatkan *flow chart* perijinan, ingin juga mendapatkan batas maksimal itu seberapa. Ini nanti mungkin perlu digambarkan. Sekaligus juga ketika kemudian data disampaikan beberapa kasus penangkapan-penangkapan itu, itu apakah data murni dari PSDKP atau itu gabungan dengan dari Satgas 115. Itu nanti saya ingin mendapatkan gambaran.

Terkait dengan BLU UKP saya juga ingin mendapatkan semacam grand desain dari BLU untuk kemudian kembali tadi mengangkat nasib dari para nelayan kira. Karena prinsipnya kembali kepada bahwa dia tidak bisa bergerak karena modal. Sementara kalau kita lihat suku bunga atau pinjaman yang didapatkan itu bunganya cukup tinggi dibanding kalau negara lain data

saya kan antara 2,5% sampai 5,5%, sementara kita kan cukup tinggi itu. Sementara dari Januari juga walaupun peningkatan tipis tetapi menunjukkan tren kenaikan 15,1% dan Juni 2019 10,52%. Artinya, justru tidak ada upaya bagaimana kemudian memberikan kredit yang kecil, bunga rendah sehingga dia bisa mensupport, malah ini trendnya naik, sementara di negara lain kita lihat supportnya cukup luar biasa. Nah, ini bagaimana kemudian grand desain dari BLU Untuk kemudian mengatasi itu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak Slamet.

Dan kita hidup kita perlu ikan harus ada beras, beras itu dari padi, padi itu kata orang sudah sri, dan srinya harus senantiasa mulia. Nah, ini semuanya ada di Dedi Mulyadi dan Yadi Mulyadi.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Terima kasih Ketua.

Bapak Sekjen, tadi mau tanya Satgas 115 anggarannya tapi sudahkan sama Kiki tadi ya, jadi saya tidak mengulang lagi. Cuma yang ingin saya sampaikan mengenai kapal-kapal yang ditangkap oleh kita. Terus saya mendukung sekali kebijakan Bapak Menteri dengan bicaranya bahwa kapal sekarang kalau dulukan langsung dibom dan ditenggelamkan, sekarang kalau masih bagus didistribusikan ke koperasi nelayan, seperti itu. Cuma permasalahannya kapal-kapal yang rusak itu ditenggelamkan masih, cuma syarat-syaratnya untuk yang diberikan ke para nelayan koperasi itu yang masih bagus. Pertanyaan saya kapal itu kapan ditangkap waktu dipakai oleh nelayan asing, artinya kapal itu masih bagus. Mungkin rusak ini karena diparkir terlalu lama menunggu proses hukumnya ini dipercepat agar kapalnya bisa bermanfaat untuk didistribusikan kepada koperasi nelayan.

Itu saja dari saya Bapak Sekjen.

Terima kasih Bapak Ketua.

Haturnuhun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Baik, ini urusan penenggelaman ya, saya boleh menjadi brand yang terbangun di publik itukan rasa takut. Jadi kenapa asing waktu itu agak takut terhadap Indonesia karena dengar kalau masuk situ langgar langsung ditenggelamkan, sehingga itu membuat efek yang takut sehingga pada jaman itu kita tahu Natuna tidak berani lagi orang masuk. Jadi saya ingat betul di kampung saya itu ada desa, namanya desa Dauwan. Di Desa Dauwan itu tidak pernah ada pencuri, pernah ada kejadian pencurian dimasukkan sungai, 3 kali kejadian, sehingga pencuri tidak berani lagi. Jadi proses menenggelamkan itu membangun branding yang luar biasa, sehingga wibawa negara kuat. Tetapi memang boleh saya kritik, titik kelemahan Cuma satu jaman itu, aspek administrasi dan pengelolaan kepegawaian. Memang karena latar belakang yang tidak pernah bergelut pada dunia administrative, tapi urusan keberanian patut kita, saya apresiasi sehingga kedepan itu dua-duanya harus didoublekan, satu branding dan keberaniannya kuat dan yang kedua administrasinya baik. Itu sudah Indonesia jadi raksasa perikanan dunia itu sebenarnya.

Selanjutnya ini kita Pak Ichsan tadi sudah kelewat, ya boleh kembali lagi kepada Bapak Ichsan. Pak Ichsan sholat dulu kayaknya.

Terima kasih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bapak Plt. Dirjen, sudah berapa lama Pak, jadi Plt Pak? 2b bulan Pak. Dirjen PSDKP ini Plt terus, kosong terus.

Bapak Dirjen dan Bapak Direktur LPMUKP yang saya hormati dan teman-teman Komisi IV DPR RI.

Ada beberapa hal Pak, yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan Natuna ini Pak, ada hal yang ingin saya klarifikasi saja. Diluaran, di publik mengatakan bahwa kita banyak kapal-kapal asing terutama katanya dari Cina yang berkeliaran di Natuna sana. Yang tadi Bapak Ibnu Multazam sudah sampaikan seringkali terjadi di bulan Desember sampai Januari. Yang saya pikir itu bukan hanya karena persoalan siklus APBN tetapi karena ada kebutuhan di Cina terutama menjelang Imlek yang saya pahami. Nah, setelah itu memang hilang. Nah, yang saya ingin klarifikasi adalah Pak, kalau betul kapal-kapal Cina itu masuk keperairan. Tadi saya sekilas melihat data hanya 3 kapal Cina yang ditangkap Pak, hanya 3 Pak, maksudnya hanya Cina kalau Vietnam memang banyak, saya setuju Pak. Pertanyaan saya adalah kenapa kok cuma 3 selama 5 tahun ini. Dan saya lihat 3 itu juga bukan di Kepulauan Natuna, 1 sepengetahuan saya itu di Laut Arafura kalau tidak, 2 itupun sebenarnya juga bukan di Laut Arafura, tolong koreksi kalau saya salah. Cina itu bukan di Natuna ya, bukan kan Pak? artinya sepanjang 5 tahun kapal-kapal Cina, kalau Vietnam saya setuju, Vietnam sudah selesai. Kapal-kapal

Cina tidak ada satu pun kapal Cina yang ditangkap di perairan Natuna atau di WPP 711. Artinya, kita ini gagal menangkap kapal Cina yang berkeliaran di Kepulauan Natuna. Itu logika saya, artinya 5 tahun dari 2015-2019 kapal-kapal Cina yang berkeliaran di Perairan Natuna itu tidak ada satupun Pak, yang bisa ditangkap oleh pihak keamanan kita, terutama dari teman-teman PSDKP. Pertanyaan saya kenapa bisa begitu Pak, ada apa ini?

Di publik mengatakan bahwa kapal-kapal Cina berkeliaran begitu banyak katanya, tapi tidak ada satupun kapal Cina yang ditangkap di Perairan Natuna ini. Ada sesuatu yang salah, apakah salahnya di pihak kita atau pihak Cina yang punya kelebihan. Karena yang saya tahu mereka dikawal oleh cost guard Pak. Nah, disinilah maksud saya, saya ingin menjelaskan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir kita gagal mengamankan wilayah perairan kita dari serangan kapal-kapal Cina, kapal Vietnam memang banyak Pak, berarti ada sesuatu yang lebih dari Cina. Apakah kelebihanannya karena ada lebih diplomasi, apakah memang karena pengamanan kapal-kapal Cina itu cukup kuat lewat cost guard mereka atau karena kelemahan kita Pak. Jadi tidak ada satupun kapal-kapal Cina Pak. Jadi kalau ada seorang pejabat atau tokoh publik yang mengatakan bahwa kita berhasil menangkap kapal-kapal Cina di Perairan Natuna selama 5 tahun kebelakang ini buktinya mengatakan hari ini kita mengatakan dilihat dari slide yang saya lihat tadi tidak ada satupun kapal Cina yang ditangkap Pak, di Perairan Natuna di WPP 711. Ini harus jelas Pak, tolong nanti saya minta klarifikasi ada apa ini. Artinya, ada sesuatu yang salah terhadap tokoh publik itu yang mengatakan bahwa dia berhasil menangkap kapal-kapal asing di perairan Natuna, asing dalam arti Cina. Kalau asing dalam arti Vietnam saya setuju. Itu yang pertama.

Yang kedua, sepanjang 5 tahun terakhir ini kalau boleh saya kritik kita belum terlalu serius berbicara terkait dengan landas kontinen Pak. Saya ingat kata-kata professor Hasim Djalal pakar hukum internasional Pak, selama ini kita tidak pernah serius mengelola landas kontinen kita, sehingga konflik perairan kita dengan negara tetangga itu seringkali terjadi. Kasus Sipandan Lingitan misalnya, dalam pemahaman saya kasus Natuna ini salah satunya karena kita tidak pernah serius mengelola landas kontinen atau memastikan landas kontinen kita. Kalau boleh saya usulkan di dalam rapat ini Pak, saya minta KKP dalam hal ini Dirjen PSDKP untuk secara serius mengelola landas kontinen kita. Apakah kemudian Undang-Undangnya kita rubah atau seperti apa tolong ini diusulkan kepada kita Pak, karena ini konflik sudah berulang-ulang Pak. Itu yang kedua Pak Ketua.

Yang ketiga terakhir, kepada Direktur LPMUKP kalau kemudian Bapak Ibnu bilang baru sekarang, saya sudah mengenal 5 tahun. Saya kenal Bapak Syarif Sariyal ini sejak dari jamannya Bapak Firman Pak. Jadi ada satu hal yang saya ingin kritik sedikit saja terkait dengan LPMUKP ini, pertama adalah terkait dengan bunga kredit Pak, bunga perbankan ini, menurut saya ini terlalu besar Pak. Kalau tidak salah 6% ya Pak, atau 9% sekarang atau bunga banknya sesuai dengan sama bunga bank Pak. Betul Pak, berapa persen sekarang? 3%, bukan 9% ya Pak, karena saya dengar dari teman-teman kelompok petani ikan ini katanya sampai 9%, ini kita harus klarifikasi Pak. Jadi

kalau memang 3% ini menarik Pak, bagus sebenarnya tapi kalau sampai 9% saya khawatir ini memberatkan para petani ikan.

Yang kedua, kritik saya, saya ingin meminta kepada LPMUKP ini memberikan kepastian Pak, terhadap proposal-proposal yang masuk, karena banyak sekali pertanyaan kepada saya kok selama sudah hampir 6 bulan itu belum ada klarifikasinya, belum ada penjelasannya. Harus ada kepastian Pak, maksud saya, jadi jangan lagi ngadu ke DPR RI Pak, ngadunya ke Bapak Syarif saja, begitu maksud saya, karena banyak pengaduan ini Pak Ketua. Teman-teman ini tidak diberikan kepastian, katanya sudah ada skemanya bulan berapa, minggu berapa dan sebagainya tetapi dilapangan terjadi hampir 6 bulan ada beberapa kelompok yang mengajukan proposal ini, itu malah bertanya-tanya kok "nasib saya bagaimana Pak?". Artinya betul kata Ibu Kiki, tolong berikan kepastian terkait dengan sebuah tahapan-tahapan yang ada pengajuan kredit di dana bergulir ini.

Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Beberapa waktu yang lalu itu ada si Rangga dari Sunda Empire. Rangga itu kalau ngomongin kerajaan Sunda Empire itu dulu sejak jaman Alen dan Dilen. Nah, di Komisi IV DPR RI itu tidak ada Alen yang ada Alien.

Selanjutnya Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Masuk juga itu barang Pimpinan.

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan juga Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya.

Saya ingin menyampaikan bahwa Maluku dan Maluku Utara adalah LIN Bapak Pimpinan, kalau tadi Alen, Alien itu adalah LIN (Lumbung Ikan Nasional), jadi pas itu barang. Saya juga ingin menyampaikan tadi sudah

disinggung oleh beberapa teman-teman tapi juga saya ingin menyampaikan kemarin saya bulan Desember hadir di Maluku Utara untuk melakukan kegiatan Reses dan bertemu langsung dengan para nelayan-nelayan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan saya ingin menyampaikan Pak, kita kan berbatasan dengan Philipina dan sering sekali terjadi ilegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara yang *alhamdulillah* Provinsi Maluku Utara luas lautannya lebih besar daripada luas daratannya.

Selain menjadi atensi lumbung ikan nasional, saya juga mengharapkan atensi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Khususnya kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami termasuk lumbung ikan nasional tetapi masih juga susah ikan pada saat musim-musim tertentu, misalkan musim ombak, musim angin, dan disana itu sekitar 4 bulan sekali pasti terjadi kesusahan ikan dan harga ikan begitu sangat naik. Yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah hasil ikan tersebut dijual oleh nelayan kepada para penampung-penampung ikan yang dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang hasilnya adalah PAD-nya dari perikanan sangat minim karena memang ikannya tidak masuk dalam pendapatan hasil daerah Provinsi Maluku Utara. Ini juga selain ilegal fishing ada perbatasan-perbatasan perairan ini sangat harus diperhatikan. NTT, Bali ambil, kadang kapal asingnya pakai bendera merah putih tetapi tidak bisa pakai bahasa Indonesia, itu sering terjadi.

Jadi ini tolong diatensi juga Pak, tadi sudah disinggung beberapa teman saya bahwa pinjaman kepada para nelayan-nelayan itu juga harus ada kepastiannya berapa persen sebenarnya. Saya tadi kaget juga 3% yang terjadi juga ada yang bilang 6%, ada yang bilang 9%, mana yang benar ini barang. Jangan sampai dibuat pusing nelayan atau ditipu. Terus saya pernah bertanya juga kepada nelayan-nelayan yang memiliki bantuan 30 Gross Ton itu juga kadang hasil tangkapannya tidak sesuai dengan hasil kapal yang diberikan tapi mereka harus membayar pajak sesuai kapal yang diperbantukan. Maksudnya gini Pak, kalau kan 30 GT harusnya hasil tangkapan itu harus sampai 30 GT, tapi terkadang kan nelayan itu tidak mencapai target tersebut tapi pajak yang harus dibayarkan kata para nelayannya harus sesuai dengan kapal yang diberikan 30 GT, misalkan hasil 20 GT mereka ya itulah bangkrut, istilahnya seperti itu.

Terus ijin perpanjangan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perpanjangan ijin pajak inikan harus balik lagi kesini, susah Pak. Kadang mau perpanjangan lagi disusahkan gitu, jadi kadang mereka melaut dengan ijin kapal yang tidak tahu kepastiannya. Ini juga perlu diperhatikan Pak. Kemarin saya sudah sampaikan, kita disana daerah kelautan, pulau-pulau sangat susah BBM Pak. BBM yang bersubsidi adanya di Ibu Kota, sementara pesisir inikan kebanyakan nelayannya mau ambil dimana Pak. Harga BBM saja bisa sampai Rp15 ribu per liter Pak. Inikan sangat sulit dan tentunya saya ingin memberikan apresiasi kepada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah perairan Republik Indonesia.

Umumnya saya juga ingin memberikan saran kepada PSDKP, satu ke depan tantangan terhadap peran IUU Fishing akan semakin menantang terutama dalam sistem teknologi. Untuk itu, sangat perlu kita Komisi IV DPR RI memberikan penguatan terhadap sisi teknologi dengan meningkatkan anggarna untuk penguatan armada di laut, bukan hanya armada tetapi juga sistem pertahanan dengan teknologi sehingga diharapkan dapat mencegah IUU Fishing di seluruh perairan Indonesia.

Yang kedua saya juga mengusulkan perlu adanya penguatan dari sisi sumber daya manusia bukan hanya skill pertahanan, namun skill diplomasi, argumentasi, dan pengetahuan terhadap peraturan baik nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena isu IUU Fishing juga sangat erat dengan isu human trafficking. Lalu selanjutnya karena sudah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Kelautan mengenai badan keamanan nasional, maka sangat perlu komunikasi, kordinasi, dan kerja sama dengan Bakamla dalam isu human trafficking. Perdagangan senjata ilegal dan barang ilegal.

Yang ketiga, saya masih mendapatkan informasi di dalam paparan mengenai anggaran Satgas 115 yang tidak jelas sebesar Rp45 miliar. Saya sangat menyarankan agar anggaran Rp45 miliar dapat digunakan untuk penguatan di PSDKP. Saya ucapkan terima kasih untuk itu Pak, insya allah bisa dijalankan.

Untuk LPMUKP, adalah pinjaman dengan bunga 3% itu juga sangat dibutuhkan Pak, jangan tinggi-tinggi sangat susah ini nelayan Pak. Kalau 3% tolong diberikan diumumkan 3%, jangan 9%, 6%.

KETUA RAPAT:

Saya pinjam dari Bank Emok 10%.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya ini, pinjaman dengan bunga 3% dimana manfaatnya selama 3 tahun terakhir berdiri bisa dirasakan oleh pelaku usaha perikanan, di mana mereka tidak ya itulah Pak, tidak kejar tayang sehingga Pak, mau bayar utang atau mau, tidak diterima oleh bank sehingga pinjaman ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan.

Pimpinan, terima kasih ya itu saja bisa disampaikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini menyampaikan penuh kesedihan agar hidup tidak sedih....

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi sebentar Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak, digantiin siapa yang mau jadi Dirjen dan Sekjen dipersilakan. Agar hidup tidak sedih kita harus senantiasa beragam dengan baik agar kita mendapatkan kemuliaan, kebaikan dalam beragama. Dan kita beragama di laut dengan tidak meminjamkan bendera kita kepada asing untuk menangkap ikan. Urusan ini Bapak Haerudin yang akan menyampaikan. Tanpa Dirjen bertanya, menunggu Dirjen dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau semuanya nunggu Dirjen, *break* makan dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tinggal 3 lagi tanggung, 3 lagi kemudian skors, kemudian nanti kesimpulannya besok. Habis ini boleh pulang, kan gaji. Sudah kalau mau sekarang langsung dikasih bantuan perahu untuk nelayan di Garut, mau tidak? Sama kredit untuk 1000 nelayan dengan nilai Rp100 juta, tapi ngambilnya di tengah laut kemudian berenang ngambilnya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi Pimpinan, inikan keadilannya begini. Kalau Anggota yang bertanya Anggota tidak ada tidak usah dijawab, sekarang kita mau ngomong orangnya yang bertanggungjawabnya tidak ada catat. Memang kita percaya birokrasi kita, ya sudah.

KETUA RAPAT:

Ya, dipersilakan Bapak Haerudin. Sudah datang ini bintang filmnya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Sekjen beserta merangkap Plt dan yang lain hadir seluruh pejabat KKP yang saya hormati.

Ijinkan kami sampaikan, pertama ingin menegaskan yang Bapak Hansi Lema tadi. KKP kita itu ingin kayak seperti tentara, padahal harusnya daftar saja TNI sana semua kalau ingin jadi tentara. KKP itu tugasnya memberdayakan laut, pengelolaan laut yang punya dampak kepada prosperity tadi, pada kesejahteraan rakyat kita. Pikiran saya itu ingin berubah cara pandang yang tadi, kenapa kita berpikir keras-keras untuk pengamanan

laut sehingga anggaran terbesar di PSDKP, sementara untuk pemberdayaan hanya berapa persen dari anggaran seluruh kelautan. Saya dari Fraksi PAN saya, Haerudin 502 menolak penambahan anggaran jika postur anggaran seperti itu, tidak berikan persetujuan dari hari ini. Tapi kalau postur anggarannya adalah untuk pemberdayaan rakyat berapapun pasti didukung. Ini kenapa ingin kami sampaikan harus wajib ada Bapak Sekjennya, karena Bapak Sekjen sebagai manager dan yang *me-manage* bagaimana nanti anggaran kedepan bisa menjadi bagian dari kesejahteraan rakyat kita.

Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Sekjen untuk disampaikan kepada Bapak Menteri. Kordinasi saja di Bakamla dengan seluruh *stake holder* untuk pengamanan laut dan jelas, urusan daulat darat, daulat laut, daulat udara tentara tugasnya. Dan karena dia penganut politik negara yang tugas dan fungsi pokoknya tidak boleh sejengkal pun tanah keluar dari NKRI, tidak boleh satu nyawa melayang karena persoalan martabatnya dihina oleh siapa pun sebagai warga bangsa itu tugas tentara dan polisi kita. Sementara KKP bukan itu tugasnya. Nah, untuk itu kalau KKP ingin jadi tentara keluar dari KKP, jadi tentara saja terus sana. ini gagah-gagahan kita ini bergaya tentara semua, padahal sudah punya tugasnya masing-masing. Kita ini manajemen bagaimana laut terkelola dengan baik, sumber daya terkelola dengan baik, ikannya bisa bermanfaat besar bagi rakyat. Kenapa mereka datang, saya yakin orang KKP banyak yang tahu dari dulu juga lebih tahu daripada Ibu Alien Mus, lebih tahu daripada Bapak Dedi Mulyadi. Orang KKP siapa mereka yang datang, yang melakukan pencurian, siapa yang mereka yang datang yang melakukan proses jual beli di tengah laut jual beli ikan ilegal fishing. Saya yakin lebih tahu, kenapa masih lolos, itu masalah bobroknya mental para pejabat kita. Apa hebat saktinya dari Cina, bukan itu. Apa orang Taiwan hebat atau apa karena bisa lolos, bukan. Tapi mental bobrok kitai itu berani banget sama nelayan kita dan tidak berani sama nelayan-nelayan mereka. Tidak tahu masalahnya apa, kalau disebut dari tadi tuduhan.

Nah, untuk itu ingin saya sampaikan lebih sayangnya kepada nelayan kita itu. Saya ingin dijawab sama Bapak Sekjen hari ini, apa nelayan kita bertambah atau berkurang? Ijin Pimpinan mohon dijawab langsung. Saya ingin sampaikan per hari ini apa nelayan kita bertambah atau berkurang.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, nelayan kita bertambah atau berkurang?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Sepengetahuan saya jumlah nelayan meningkat.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Meningkat, ada datanya Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Insyallah ada Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Kalau dari sisi pendataan saya hari ini di Dapil terutama karena ada pelabuhan kecil, warga itu banyak ke kota jadi buruh bukan jadi nelayan. Bapak jangan bohong, ingin saya buktikan kegagalan KKP, dari 11 triliun hari ini berapa triliun anggaran kita, itu kegagalan. Dan kita makanya kalau hari ini mau mendorong anggaran harus besar tentu kita harus mendorong tetapi apa tujuannya. Kalau ingin gagah-gagahan kayak tentara Fraksi PAN menolak sejak hari ini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bicara laut bukan hanya bicara ikan, tetapi bicara mutiara yang disukai oleh perempuan. Perempuan itu senang sekali terhadap mutiara dan kalau perempuan dikasih mutiara maka dia selalu memuji suaminya. Dan perempuan yang memakai mutiara dan memuji suaminya itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah Luluk Hamidah, itu dibahasa Arabkan artinya mutiara yang memuji.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Dirjen dan semua rekan, baik Komisi IV DPR RI dan KKP.

Saya ingin selamat datang mengucapkan untuk diri sendiri. Terima kasih Bapak, dari tadi memang saya menyimak pertanyaan dari teman-teman ya, karena memang orientasinya laut. Saya sih setuju bahwa memang, pertama kita negara maritime dan perairan kita juga yang terbesar, terluas, terpanjang di dunia, sehingga fokus dan konsentrasi kesana. Cuma saya juga tidak ingin ada diskriminasi ini Pak, kalau mau ngomong soal KKP, karena KKP ini selain kelautan juga perikanan, selain tangkap itu juga ada daratan. Nah, yang daratan ini yang jadi masalah karena kebetulan sudah dipancing soal Dapil. Dapil saya ini tidak masuk dalam radarnya KKP kalau kasusnya kayak begini.

Pertama, saya mau melihat ini di BLU. Begitu saya lihat di JawaTengah ini tidak masuk juga tiga-tiganya kabupaten padahal di Dapil saya itu ada Waduk Gajah Mungkur. Itu sumbangannya 800 ton itu sekian

tahun lalu dan sekarang sudah hampir 1000 ton. Kemudian ada Waduk Kedung Ombo yang itu sudah mengorbankan ribuan orang sampai sekarang juga muncul ketika air surut itu ternyata ada ribuan makam itu yang tumbuh. Itu artinya, dulu ada satu proses yang luar biasa untuk bisa menciptakan waduk itu. Tetapi kemudian memang ini tidak pernah terbicarakan, pertama tentang kesejahteraan mereka, yang kedua juga bagaimana pemberdayaan masyarakat, baik yang mengambil manfaat langsung dari situ ataupun yang disekitarnya Pak, nah itu yang paling penting. Keluhan dari teman-teman ketika Reses pertama disana terutama yang di Wonogiri sama yang di Kabupaten Sragen itu ketika kita mengorbankan ribuan hektar katakanlah tanah untuk diberikan oleh negara dan itu ternyata air pun sebenarnya juga tidak dimanfaatkan langsung oleh dua kabupaten ini karena harus menyangga kabupaten yang lain. Tetapi apa kemudian yang mereka terima balik dari apa yang telah diberikan oleh negara. Sekurang-kurangnya mendapatkan manfaat secara ekonomi dari sektor perikanan yang mereka miliki, minimal itu.

Nah, yang menjadi masalah selain ada persoalan yang panjang terutama para nelayan di waduk ini karena dianggap menggunakan beranjang atau apa begitu, sementara tidak ada dukungan fasilitasi yang memungkinkan para nelayan di waduk ini bisa menggunakan perahu atau alat tangkap yang katakanlah lebih ramah untuk ekosistem dan seterusnya. Nah, inikan perlu dulungan. Nelayan disana juga sempat misalnya bilang “okeelah kalau tidak bantu kapalnya tetapi dibantu kita membuat kapal”, sehingga kedepan mereka juga bisa mandiri, bisa produksi. Dan ini sekarang sudah mulai kita ingin dorong menuju kesana. Mereka mempunyai kemampuan itu tetapi fasilitasi permodalan untuk membuat kapalnya ini yang tidak ada. Nah, ini juga termasuk salah satu yang mereka butuhkan. Cuma begitu saat ini Pak, BLU-nya ini kok ternyata tidak masuk, jadi saya sedih. Nah, ini mohon nanti ini dikoreksi ya Pak. Jadi bukan hanya laut KKP itu punya tetapi juga perikanan yang darat.

Nah, selain yang tadi konteksnya soal waduk kan juga ada budidaya perikanan yang itu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok-kelompok juga perempuan. Mereka bisa menggunakan lahan-lahan yang kecil dan seterusnya termasuk menggunakan *bioform* dan seterusnya. Nah, apakah di dalam skema program yang sudah dirancang ini karena memang saya tidak melihat detailnya itu juga sudah masuk di dalam bagian dari apa yang akan dilakukan oleh KKP, termasuk tadi saya setuju untuk mendukung pemberdayaan lebih banyak. Karena apa? Karena sama sebenarnya jumlah nelayan kalau di tempat saya meskipun itu tidak masuk radar KKP gitu ya, itu juga sudah semakin kecil, itu juga makin kecil, termasuk juga para pegiat kelompok usaha yang dibidang budidaya ikan ini Pak. Disisi lain bahwa ada satu kesadaran bahwa ikan inikan mendukung pangan, mendukung peningkatan gizi, stunting di tempat saya itu masih 39,64% *it's amazing* hari begini stunting itu masih angkanya segitu, ini mau Pilkada pula. Ini banyak sekali dan Bupati-nya dari partainya Bapak, ini problem kita semuanya dan ini banyak sekali. Jadi saya ingat ini ternyata mungkin konsumsi ikannya sangat rendah.

Kemudian jangkauan mereka terhadap akses ikan itu juga tidak cukup. Terus kemudian tidak ada *cold storage* yang memungkinkan tempat penyimpanan ikan itu bisa bertahan lebih lama, sehingga memang ikan-ikan yang beredar disana juga berkualitas yang tidak bagus. Terus kemudian makanan lokal sangat tidak sehat. Nah, bagaimana kita bisa dorong tadi Pak, jadi pertama ada peningkatan gizi masyarakat, penurunan stunting, tapi juga digalakkan terkait dengan budidaya untuk air tawar. Nah, ini juga mungkin bisa menggerakkan orang-orang muda, karena tidak semua orang mud aitu pilihannya kan melaut, karena itu juga butuh skill yang luar biasa, itu sudah panggilan alam, panggilan leluhur untuk bisa menjadi nelayan yang di laut disana. Tetapi untuk menjadi budidaya ikan tawar itu masih jauh memungkinkan, apalagi kalau dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang kekinian, kemudian juga penetrasi pasar yang itu juga menarik orang-orang muda. Apalagi kalau kemudian dikenalkan dengan pelatihan atau pengolahan hasil ikan, jadi bukan jual ikannya saja, tetapi misalnya ada produksi pasca pengolahan atau pasca panen. Saya kira mungkin hal-hal seperti itu yang perlu juga ditingkatkan karena saya tidak mungkin cerita yang spesifik tentang Dapil saya karena tadi tidak masuk di radar KKP, tapi kalau kita bicara daratan pasti bisa.

Nah, ini yang terkait dengan IUU *Fishing*, karena ini masalah nasional, masalah kedaulatan juga, masalah Indonesia, saya sebenarnya ingin menanyakan sederhana juga. Kalau kita membuat skor 1-10 sebenarnya kemampuan Indonesia katakanlah ini KKP gitu dalam mengawasi semua kejahatan yang terkait dengan ilegal fishing atau IUU, baik itu yang reported, unreported, itu sebera sih skornya. Kenapa misalnya kita memilih skor itu kalau Bapak misalkan bilang oke kemampuan kita dalam hal pengawasan dan kemampuan kita untuk, baik itu menanggulangi ataupun juga mengatasi kejahatan di sektor perikanan itu misalnya 7 atau 8, kenapa kita pilih angka 7 atau 8 itu nanti Bapak yang jawab. Nah, problem kita selama ini ada dimana, apakah kordinasi antar sectoral itu yang memang ternyata tidak lancar, misalnya disitu ada problem sektotal antara KKP, kemudian ada TNI, ada Polri, ada Bakamla atau seperti apa. Nah, inikan penting atau justru masalahnya ada di Undang-Undang yang memang tidak sinkron, baik itu Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ZEE itu yang tidak sama. Misalnya ada satu Undang-Undang yang itu yang menekankan atau yang memberikan *inpush* denda kepada kejahatan di perikanan itu misalkan tidak lebih dari 220 juta doang misalnya, hari gini masih 15 ribu kejahatannya, sementara di Undang-Undang yang lain itu sudah bisa sampai 20 miliar. Nah, ini yang akan digunakan ini yang mana, selama itu ternyata yang dipakai yang mana Pak, yang dendanya rendah atau denda yang maksimum.

Terus yang kedua, kita inikan mengenal kehatan korporasi. Apakah selama ini kejahatan korporasi itu yang ditegakkan dalam hal ini misalnya IUU Fishing ini, sementara yang sering ditangkap itukan ABK sama nahkodanya, itukan belum tentu *owner*-nya, tidak mungkin *owner* melaut, siapa yang mau ambil resiko paling besar. Nah, kita belum pernah dapat juga report seperti itu bahwa kehatan ini yang terkait dengan korporasi kemudian penindakannya itu juga korporasinya sampai *owner*-nya ini yang misalkan diangkat. Nah, ini kita ingin dengar yang seperti itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

IUU *fishing* ini temanya, dan seluruh rangkaian ini pada akhirnya kan kita ingin mencapai kebahagiaan nelayan, jangan bahagiannya kita saja. Dan untuk Bahagia nelayan itu agar kebahagiaannya menjadi satu kita tunggu fatwa dari firmannya Soebagyo.

Terima kasih.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya ini kalau sama Dedi ini kunjungan kerja pun terhibur terus Pak, jadi tidak pernah tidak ketawa.

Pimpinan yang saya hormati,
Bapak Dirjen beserta jajarannya dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Bapak Pimpinan, saya ini kadang-kadang nanya Bapak Nilanto, kunjungan kerja Komisi maupun kunjungan kerja ke Dapil ini menjadi Anggota DPR RI sudah kesekian kali itu juga malu. Malunya itu ditanya Bapak ini sudah berapa kali ketemu kami, tapi urusan saya yang berapa tahun lalu tidak selesai juga terus Bapak sekarang mau ngapain lagi. Inilah mungkin kadang-kadang yang akhirnya teman itu tidak terpilih lagi karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu.

Pak Dirjen, hari ini tadi Bapak Pimpinan menyampaikan bahwa materi rapat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan ilegal fishing. Apa sih tujuannya kita memberantas itu? pernyataan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah dampak terhadap penangkapan yang kemarin heboh oleh Ibu Susi itu terukur tidak terhadap feed back penerimaan negara dari perikanan tangkap. Beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan panjang karena ada data yang tidak sinkron antara BPS dengan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang konon katanya dampak penerimaan negara itu sekian triliun. Nah, dari BPS mengatakan tidak seperti itu.

Kembali kepada persoalan ini adalah salah satu tujuannya ketika itu waktu Ibu Susi menyampaikan paparannya pertama kali kan dengan ilegal fishing diharapkan adalah agar nelayan nasional itu bisa lebih banyak dan pendapatan negara meningkat dan kesejahteraan nelayan meningkat. Hari ini Pak, masih banyak nelayan kita yang ngurus ijin kapal susah. Bahkan pembatasan-pembatasan terhadap GT masih dilakukan dan sekarang ini banyak juga yang sudah terlanjur ketika itu konon katanya seperti kapal

angkutan itu diijinkan minimal 200 GT ternyata dilarang juga. Belum kapal-kapal lainnya Cantrang yang ketika itu juga diarahkan untuk *move on* ke alat lain, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah karena akhirnya KKP tidak menyelesaikan apa persoalan yang dihadapi teman-teman nelayan.

Oleh karena itu, tadi kalau dikatakan nelayan kita bertambah, betul tadi Pak, apakah ada datanya. Mungkin ini perlu dijawab dan dimana saja kenaikan itu, karena sampai hari ini yang cantrang pun sudah diijinkan itu juga mengurus ijin masih susah. Pak Zul itu lebih senang keliling-keliling kemana-mana ceramah daripada mengurus tugas kewenangannya mengeluarkan ijin-ijin yang dimiliki oleh para nelayan kita.

Yang ketiga, apakah Bapak-bapak sadar tidak tentang masalah perijinan ini. Ini terkait dengan masalah kriminalisasi bagi nelayan kita Pak, akibat perijinan kita yang begitu banyak dan masa berlakunya tidak sama, ini menimbulkan persoalan hukum di tengah laut. Nelayan itu Pak, baru keluar dari pelabuhan itu sudah dikerjain oleh Syahbandar. Begitu sudah dilepas pantai ada lagi yang namanya Pol Air. Begitu di zona ZEE ada lagi yang namanya Angkatan Laut dan sebagainya. Bapak berani tidak seandainya ternyata ada kapal berbendera dua tadi dan itu dilindungi oleh Angkatan Laut. Bapak tahu tidak pemerasan yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan Pol Air. Ini Pak, yang menyiksa nelayan kita Pak. Itu terang-terangan Pak, kalau saya ketemu nelayan itu bukti transfer itu yang melalui ATM itu setumpuk, tetapi itu kenapa tidak diusut. Tetapi kenapa itu tidak diusut, kita diam, nelayan tidak berani Pak, karena ancamannya begitu sudah ditangkap “mana nomor telepon bos kamu?”, langsung ditelepon dan minta malam ini juga ditransfer ke nomor ini dan di WA nomor bukti transfernya. Itu ada Pak, ini yang menjadi persoalan hari ini.

Oleh karena itu, saya rasa ini menjadi persoalan yang serius untuk kita selesaikan kenapa kita tidak pernah menganut negara-negara maju yang sering saya sampaikan sejak dulu jaman Pak yang dari Papua itu jadi Menteri, Pak Rembi Numbea itu kan pernah mengusulkan waktu itu bahwa akan ada pengurusan ijin melaut kapal itu satu atap. Saya rasa ini bagus tetapi kenapa tidak pernah terlaksana. Dan ini akan memberikan kemudahan, ibaratnya kapal itu nanti kalau di mobil saja bisa ini berkali-kali saya sampaikan, hanya keluar dua ijin bukti kepemilikan kapal kalau di mobil itu BPKP sama STNK. STNK itu nanti isinya macam-macam, ada ijin untuk penggunaan radio dan sebagainya. Sehingga ijin itu berlaku masa berlakunya sama sehingga mereka itu mesti akan bebas daripada kriminalisasi. Nah, ini saya rasa perlu menjadi PR mumpung ini dipenghujung tahun daripada Menteri baru saya rasa ini harus dipikirkan hari ini. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dan masalah serius tadi kriminalisasi di tengah laut nelayan kita. Nyaris mereka itu tidak berdaya.

Nah, mengenai masalah Bapak Ichsan tadi betul. Kenapa kita sering-sering kalah dalam proses di peradilan internasional. Kita ini punya Undang-Undang Kelautan Pak, itu ada amanat dari *unclose* waktu itu kita dapat masukan dari Kementerian Luar Negeri dan disitu ada kewajiban setelah diundangkan itu untuk dilakukan kerja sama bilateral antara Pemerintah

Indonesia dengan negara tentang status kedudukan dan standarisasi dan kualifikasi daripada nelayan tradisional. Saya rasa ini perlu ditindaklanjuti karena banyak sekali nelayan kita selain ditangkap oleh Angkatan Laut dan Pol Air juga banyak yang nyebrang ke wilayah perairan dan itu ditangkap itu nyaris juga tidak terlindungi. Ini juga harus menjadi perhatian kita, kita tidak hanya menangkap yang ada di dalam negeri tetapi yang diluar juga kita perhatikan.

Oleh karena itu, saya juga ingin menegaskan kemarin pada itu di Badan Legislasi Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Kita ini selalu kalah dalam proses hukum wilayah perbatasan perairan, pulau-pulau kita di pengadilan internasional karena kita tidak punya Undang-Undang Landas Kontinen. Mohon dicatat betul Pak, ini mumpung ini masih di penghujung saya rasa ini masalah ketahanan negara. Saya rasa ini landas kontinen untuk diprioritaskan untuk wilayah territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada gunanya kita akan menyiapkan alutsista akan tetapi kalau kita tidak punya Undang-Undang Landas Kontinen. Semua negara punya, hanya Indonesia yang tidak punya ini aneh dan ini ada pembiaran. Saya rasa ini perlu dilakukan.

Terus kemudian Pak, LPMUKP Pak Syarial ini juga mohon berapa jumlah alokasi dana yang disediakan. Jangan sampai nanti teman-teman Komisi IV DPR RI ini karena ada program menyampaikan ke seluruh wilayah pelosok tanah air ternyata dananya tidak ada, ini kita bisa digebukin orang. Lebih baik kita terang-terangan saja kalau dananya tidak cukup ya mungkin seperti Komisi IV DPR RI inikan 50 orang, wilayah Bapak sekian-sekian, tapi harus pasti keluar, jangan sampai tidak keluar. Saya rasa ini Bapak Pimpinan yang kami sampaikan yang penekanan saya adalah tadi kriminalisasi dan proses perijinan dan pembatasan ijin kapal. Kalau kapal asing ditangkapi kemudian kapal nasional kita dibatasi ya bagaimana bisa meningkatkan penerimaan negara.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Barangkali orang pusat itu kalau sama daerah itu perijinannya kalau 14 hari tidak keluar itu langsung tiba-tiba keluar ijin dari BPKM. Padahal penolakannya itu karena aspek lingkungan dan segala macam. Tapi kalau di UTR-nya sudah peruntukan itu langsung Pak, sehingga kalau di pusat itukan rajanya daerah harus lebih cepat dibandingkan dengan daerah, dengan sistem perijinan yang satu karena problem kita ini satu kok ego sektoral. Setiap orang punya cara pandangnya, perhubungan punya cara pandang,

KKP punya cara pandang. Laut itu dijaga oleh 3 loh kekuatan, KKP, Bakamla, sama Angkatan Laut.

Nah, menurut saya agar ini beres yang 3 ini sinkron, ketiga-ketiganya melindungi kekayaan alam Indonesia. Dan agar kita terlindungi badannya harus sehat, agar sehat makan siangnya sudah telat 1,5 jam. Kita makan siang dulu dan kembali ke ruangan ini pukul 14.00 WIB. Setuju?

(RAPAT DISKORS)

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena sebentar lagi kita akan ada Paripurna pukul 15.30 WIB. Dipersilakan untuk memberikan jawabannya, wajah tegang ketika paginya dihilangkan karena mimpinya saya diganti dengan wajah penuh dengan kebahagiaan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Ibu dan Bapak sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, serta Ibu dan Bapak sekalian Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Kami menyampaikan banyak terima kasih, begitu daftar kita buka ada 19 pertanyaan yang ditujukan kepada kami khusus agenda pada pagi hari ini adalah terkait tentang penanganan *illegal unregulated* dan *unreported fishing* serta pengelolaan *revolving fund* di BLU LPMUKP di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memilah terlebih dahulu pertanyaan sesuai dengan agenda yang akan kami respon pertama adalah terkait dengan pertanyaan IUU *Fishing* dan yang kedua baru akan menyangkut tentang BLU LPMUKP.

Yang dalam kesempatan ini Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon ijin akan mencoba merangkum semua pertanyaan dan akan menjawab sekaligus dari pertanyaan-pertanyaan yang kami rasakan substansinya sama antara satu dengan yang lain. Tentu terkait dengan IUU *Fishing* mohon ijin Bapak, saya akan menyampaikan jawaban terkait dengan SDM pengawasan. SDM pengawasan tadi juga telah disampaikan oleh dari beberapa Anggota Komisi IV DPR RI. Dan ini menurut hemat kami memang menjadi PR yang paling

penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Menyangkut pertanyaan dari Bapak Ibnu, disampaikan terkait dengan seberapa jauh PSDKP akan mampu menguasai medan laut Indonesia yang sedemikian luas. Kalau boleh kami sampaikan, pertama sarana dan prasarana pengawasan di laut sangat dibutuhkan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu peningkatan sumber daya manusia pengawasan yang ada juga harus ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan yang harus kita penuhi untuk mampu mengawasi laut di Indonesia.

Terkait dengan peningkatan SDM pengawasan, saat ini KKP memiliki 1.471 orang yang tersebar di kantor pusat dan 14 UPT pengawasan Ditjen PSDKP, yaitu yang tersebar di 8 pangkalan pengawasan SDKP dan 6 stasiun pengawasan SDKP. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM pengawasan tahun 2018, Ditjen PSDKP telah melakukan penambahan personil dari penyuluh perikanan sebanyak 79 orang. Dan berdasarkan perhitungan atau proyeksi atas kebutuhan SDM untuk optimalisasi tugas pengawasan masih diperlukan lagi tambahan kurang lebih sekitar 1.700 SDM pengawasan yang akan kami sebar di seluruh Indonesia.

Khusus terkait dengan keterbatasan SDM pengawasan di Maluku sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdullah, Ditjen PSDKP telah terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan di Maluku melalui kegiatan operasional pengawasan termasuk pemenuhan SDM-nya. Untuk kegiatan yang telah dilakukan PSDKP khusus di Maluku dan Maluku Utara sekaligus, saya mohon ijin menyampaikan bahwa KKP dalam hal ini PSDKP telah membangun stasiun PSDKP di Kota Ambon. Dan yang akan mengawasi PSDKP di Ambon dan sekitarnya samapai ke Maluku Utara.

Yang kedua, pangkalan PSDKP Tual yang mengawasi Maluku Tenggara dan sebagian Papua. Selanjutnya mengupayakan penambahan personil SDM di Maluku melalui rekrutmen personil dari penyuluh perikanan ke Ditjen PSDKP sejumlah 6 orang yang akan memperkuat pengawasan di Maluku.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Alhamdulillah kami dari PSDKP menerima limpahan beberapa orang, beberapa puluh kawan-kawan penyuluh untuk bekerja bersama kami di PSDKP.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Pusdal (Pusat Pengendalian) atau *war room*, yang dimiliki oleh....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Ketua, boleh saya ijin interupsi sebentar Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Plt. Dirjen Bapak Sekjen, di tentara itu terkenal atau di TNI ada maksimum *Minimum Essential Force* (MEF), artinya kan bukan hanya sekedar kemudian ada SDM sekian lalu dipindahkan. Sebenarnya berapa kebutuhan untuk mengawasinya, minimum essential force kalau istilah di dalam TNI itu. Nah, kalau kemudian Bapak Dirjen mengatakan bahwa inikan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibnu tadi, bahwa kemudian seberapa kuat dan seberapa mampunya KKP untuk mengawasi perairan nasional. Di situ ada unsur Bakamla, di situ ada TNI Angkatan Laut, di situ ada Pol Airut. Nah, sekarang berapa sesungguhnya kebutuhan. Kalau bahwa kemudian apakah akan dipenuhi terus, ya tentu tidak. Kami di DPR RI punya pegangan jadinya Pak, seberapa sesungguhnya minimum essential itu, kebutuhan yang. Misalnya tadi ada keinginan kapal pengawas ditambah, berapa jumlah layarnya, kemudian ada tidak pesawat pengawas misalnya begitu. Nah, itu kebutuhannya berapa itu, maksud saya itu yang perlu dialami.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, terima kasih banyak Bapak Ichsan. Pertanyaannya mendorong kami untuk bisa menyampaikan lebih lengkap dan lebih detail. Baik, yang pertama terkait dengan sarana kapal pengawas untuk setara dengan apa yang digunakan di TNI, minimum essential force yang kita butuhkan, kita membutuhkan 76 kapal pengawas berbagai macam ukuran. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami menyambut baik....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

76, yang eksisnya berapa Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Yang eksis 34 sementara yang siap operasional dalam keadaan sehat sekitar 22.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Berarti ada yang tidak sehat itu 12?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

4 siap dimusnahkan, 6 sudah menjelang batas waktu, sehingga walaupun toh dilakukan reparment akan membutuhkan anggaran yang terlalu besar, sehingga kami mengalokasikan anggaran di tahun 2020 pengadaan dua kapal pengawas ukuran 32 meter.

Yang berikutnya Pak Ichsan, Ibu dan Bapak sekalian, di samping kapal pengawas kami selama berapa tahun terakhir mempergunakan patroli udara *airbone survailance*. *Airbone survailance* keberadaannya sungguh amat sangat penting dari sisi efisiensi dan efektifitas untuk mengetahui keberadaan kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perairan Indonesia.

Yang ketiga, kami menyambut baik dan terima kasih seandainya Komisi IV DPR RI akan mendukung pengadaan pesawat terbang yang akan dikelola sendiri secara independent oleh KKP. Sebagai catatan Ibu dan Bapak sekalian, keberangkatan *airbone survailance* tidak boleh diketahui oleh siapa pun kecuali oleh petugas yang bersangkutan, karena sifatnya adalah misi rahasia. Kita akan masuk ke suatu wilayah sebelum melakukan gerakan intercept mengerahkan kapal pengawas yang beroperasi di laut.

Di samping itu Pak Ichsan kami pun juga memiliki stasiun bumi di Perancak, di Gondol, itupun juga memberikan banyak kemudahan bagi KKP untuk melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan kajian data tahun 2016 bisa diperoleh sampai 60%-70% buget efisien gara-gara kita menggunakan informasi dari data satelit. Sehingga titik yang harus kita kejar menggunakan kapal pengawas langsung, jadi tidak lagi mencari akan tetapi hunting ke satu titik tertentu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, bisa memahami betapa berat tugas PSDKP untuk meng-*cover* seluruh wilayah perairan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak, nanti jelaskan saja secara tertulis Pak, karena biar maksud saya begini. Nanti kan ada kebutuhan anggaran tahun 2021, 2021 itu kita seperti apa. Jadi teman-teman KKP terutama Ditjen PSDKP ini, itu punya minimum *essential force* seperti apa, skenarionya seperti apa. Misalnya satelit apa, kemudian ada *war room*-nya, nah berapa kebutuhan kapal pengawas. Kalau memang dibutuhkan misalnya pesawat ada *airbone survailance it's oce*, ada perlu berapa pesawat. Ini untuk memperkuat posisi tapi dengan catatan tidak boleh tumpang tindih antara Bakamla, TNI Angkatan Laut, Pol Airut. Saya minta secara tertulis saja Pak, kalau penjelasan disini mungkin agak terlalu rumit, saya minta penjelasan secara tertulis.

Terima kasih Ketua.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Siap, terima kasih banyak Bapak Ichsan. Kami akan segera sampaikan secara tertulis kepada Bapak Ichsan tentang kebutuhan dan strategi PSDKP untuk 5 tahun kedepan.

Baik, selanjutnya tentang diplomasi maritime, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kami di KKP khususnya PSDKP terlibat aktif di dalam diplomasi maritime, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Terkait dengan bilateral seperti yang Bapak sampaikan tentang landas kontinen, Bapak Firman juga menyampaikan hal ini dan terima kasih bahwa Undang-Undang Landas Kontinen yang ditetapkan tahun 1973 sudah masuk di Prolegnas untuk di-review dan diperbaharui dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kedepan kita memiliki Undang-Undang Landas Kontinen yang lebih up to date mengikuti perkembangan yang paling akhir saat ini.

Kemudian tentang proses percepatan perijinan kapal perikanan. Mohon ijin Bapak Ketua, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai ilustrasi detail lengkapnya tentu Bapak Dirjen Perikanan Tangkaph yang akan menyampaikan secara runut, secara lebih lengkap.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Proses perijinan kapal perikanan melibatkan lebih dari 3 kementerian dan lembaga, mulai dari kapalnya sendiri ada di Perhubungan Laut. Kemudian berbicara tenaga kerja, ABK di atas kapal, terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian terkait dengan kalau TNI AL dan Polri tidak menyangkut sama sekali, tidak ada kaitannya dengan perijinan sepenuhnya ini berada di dalam ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tentang percepatan proses perijinan kapal perikanan Bapak Menteri pada awal bulan Januari kemarin telah me-loungching apa yang disebut dengan Silat (Sistem Informasi Ijin Layanan Cepat) 1 jam untuk bisa memperoleh surat ijin penangkapan ikannya. Surat ijin penangkapan ikan pun juga tidak lagi harus didatangi menerima dalam bentuk hard copy tetapi cukup mendapatkan QR Code yang bisa di-scan, bisa diprint dimana pun sepanjang yang bersangkutan memiliki, sudah menerima email atau melalui WA langsung terbit, dicetak dimanapun bisa. Ini akan sangat memudahkan.

Kemudian pertanyaan ketiga, ada tadi beberapa pertanyaan seperti Bapak Abdullah sudah tidak ada disini dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ibu dan Bapak sekalian, Bapak Menteri telah membentuk apa yang disebut dengan Komisi Pemangku Kepentingan sektor kelautan dan perikanan atau kami menyebutnya adalah KP2. KP2 telah melakukan rapat plenonya yang pertama kemarin pada Rabu tanggal 5 Februari mengundang semua *stake holder* diterima oleh KP2 yang dipimpin oleh Bapak Romandahuri, Bapak Effendi Gojali, Bapak Bachtiar Ali dan para cerdas cendikiawan serta mewakili pelaku usaha mendengarkan semua masukan. Mudah-mudahan dalam bulan Februari semua peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, apakah

menyangkut perikanan tangkap, apakah menyangkut budidaya, apakah menyangkut tentang BPIPM, PDS, semuanya akan dilaporkan, akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan Rapat Kerja yang akan datang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi, Bapak Sekjen apa itu tugas runutnya mereka-mereka itu yang duduk sekian banyak orang itu di pemangku kepentingan itu. Apakah sebagai staf ahli atau sebagai apa di KPP itu, minta penjelasan itu Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik Pak, terkait dengan KP2 secara ringkas kalau kami boleh menyampaikan nanti kami juga akan sampaikan keputusan Menteriannya kepada Bapak dan kepada Bapak Ketua sekiranya seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan copy-nya. Pada intinya Komisi pemangku kepentingan ditunjuk oleh Bapak Menteri untuk bisa mendengarkan seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat, seluruh *stake holder* Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi investment friendly, akan semakin baik, semakin memudahkan terkait dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden, meningkatkan ekspor dan investasi sekaligus. Untuk itulah sekarang sedang digodok, sehingga beliau-belaulah Pak, yang akan menampung, akan merekam seluruhnya dan merekomendasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya tentu akan ditetapkan sebagai sebuah kebijakan yang akan dipergunakan 5 tahun kedepan.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, ada salah satu titik kelemahan dalam sistem pengelolaan ketata negaraan di kita hari ini. Termasuk pengelolaan sistem kepegawaian. Seringkali ketika menjabat menjadi Menteri selalu bawa rombongan dan punya gagasan baru. Sedangkan di Menteriannya itukan sudah banyak orang yang eselonnya mulai dari 3A sampai 4B, 4D mengalami kelautan yang panjang. Mengetahui seluk beluk anggaran segala macam, ngerti betul, Cuma satu kelemahan pegawai itu satu saja, kreatifitasnya kurang itu yang saya pahami. Tetapi kalau pemimpinnya kreatif dia bisa lebih kreatif.

Nah, barangkali saya khawatir penambahan orang di setiap kelembagan kementerian itu bukan nambah semakin kapalnya cepat Pak, tapi semakin berat bebannya bahkan seringkali suka terjadi persaingan antara pegawai asli dengan pegawai pendaatang.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya yakin, kami yakin bahwa apa yang telah di bentuk oleh Bapak Menteri tentu akan memudahkan bagi beliau untuk berlari lebih cepat lagi Pak. Mudah-mudahan, *nawaitu*-nya baik sekali, mudah-mudahan.

Boleh lanjut, kemudian tentang kebijakan penangkapan Tuna Sirip Kuning atau biasa disebut bahasa lokal Madidihan, ini juga masuk di dalam kerangka kebijakan yang sedang di-review kembali oleh Bapak Menteri dengan melalui Ibu dan Bapak sekalian, yang terlibat di dalam tim KP2 pemangku kepentingan kelautan dan perikanan.

Selanjutnya tentang operasional Satgas 115, khusus tentang hal ini bahwa Satgas 115 selama ini adalah merupakan wadah, merupakan forum yang melibatkan semua unsur penegakan hukum yang ada di Indonesia yang memungkinkan bagi Satgas, dan Satgasnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menggunakan multi door approach di dalam menangani suatu kasus atau masalah yang terkait dengan perikanan. Di dalam prakteknya ilegal fishing tidak berdiri sendiri, ini sudah menjadi perhatian dunia. Di samping ilegal fishing ternyata di dalamnya ada *drug trafficking*, ada *human trafficking*, ada *human right abuse*. Kalau menggunakan Undang-Undang Perikanan sendiri niscaya hal ini tidak bisa dipecahkan. Oleh sebab itu, Satgas lebih berfungsi kepada kordinasi untuk menangani bukan masalah-masalah ringan yang setiap hari terjadi akan tetapi lebih mengedepankan memilih kasus-kasus yang sifatnya magnitude-nya sangat besar. Itu yang dilakukan oleh Satgas 115 di KKP dan demikian pula kordinasi semua unsur dilaut khususnya KKP, TNI AL dan Bakamla kita terus melakukan komunikasi sampai hari ini pun kami terus menjalin komunikasi dan kordinasi apabila kita akan melakukan kegiatan tertentu di satu titik tertentu.

KKP tidak mungkin bekerja sendirian, keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM yang kita miliki sehingga kawan-kawan TNI AL, Bakamla, serta Pol Air selalu berada di dalam radar kordinasi dan sinergi bagi kami untuk melakukan tugas fungsi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, ini operasional Satgas 115 sekarang posisinya seperti apa, apakah mau dilanjutkan atau dibubarkan, karena ini terkait dengan penggunaan anggaran. Kalau tidak salah tadi sudah ada yang menyampaikan ada 45 miliar anggaran. Sekarang saya mau tanya sebelum kita Rapat Kerja dengan Bapak Menteri, sebenarnya posisi Satgas 115 ini masih aktif atau sudah tidak ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ichsan.

Satgas 115 sesuai dengan Keppres 115 yang berakhir pada bulan Desember 2019 adalah struktur organisasinya, penempatan SDM-nya yang berakhir pada bulan Desember 2019. Sementara untuk Satgas 115 sendiri sampai hari ini, Ibu dan Bapak sekalian masih belum dicabut atau diputuskan lanjut atau tidak lanjut oleh Bapak Presiden. Sebagai laporan bahwa Bapak Menkopolhukam saat ini sedang melakukan review dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diputuskan tentang operasional Satgas kedepan, apakah akan lanjut menggunakan terminology Satgas 115 sebagaimana dalam Keppres 115 ataupun akan dilakukan perubahan kami masih menunggu arahan dari Pimpinan lebih lanjut. Sementara dari sisi teknis kami di Sekretariat Satgas 115 di KPP kita sedang melakukan review terkait dengan petunjuk teknis operasional Satgas arahan Bapak Menteri kita diminta melakukan review penelaahan ulang dan juga akan memulai memperhitungkan pengisian organisasi Satgas dalam waktu dekat sekiranya ini diijinkan diminta untuk dilanjutkan kembali.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Ketua, ijin.

Boleh tidak disampaikan review secara internal, review internal analisis dari Dirjen PSDKP terkait keberadaan Satgas 115 itu seperti apa. Review internal apakah mau dilanjutkan ataupun memang berfungsi dengan baik atau sebenarnya sudah tumpang tindih. Saya minta penjelasan itu Pak, hasil review internal Pak, kalau boleh ini kalau memang tidak diperkenankan ya tertulis saja Pak. Tapi inikan kita ingin tahu saja, karena begini kami di DPR RI juga kan bagaimana pun harus memutuskan Pak, keberadaan anggaran di 2020. Kalau kemudian hasil review internal mengatakan kita lanjutkan misalnya ya kita akan telaah lagi, apakah memang betul fungsi atau tidak. Nah, kita minta analisis Pak, kalau boleh diperkenankan karena ini walaupun internal kami ingin dapatkan informasi itu sehingga kemudian kami juga bisa memutuskan apakah anggaran nanti jika dibekukan atau dibubarkan berarti kita realokasi anggarannya. Tapi kalau memang dilanjutkan apakah perlu ditambah atau tidak, kan nanti ada proses realokasi pada saat nanti Rapat Kerja dengan Bapak Menteri. Kami minta penjelasan itu.

Terima kasih Bapak Ketua.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Bapak Ichsan.

Pada kesempatan yang sangat baik ini mungkin kami lebih elok kalau menunggu arahan dari Pimpinan kapan Satgas ini akan ditetapkan, *move on* atau cukup berhenti, tentu itu akan lebih tepat apabila kami diberikan ijin untuk menunggu waktu pada saatnya nanti.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ini rahasia ini ya Pak, intinya ini kebutuhan internalnya KKP-lah, tapi bantu kami Pak, jelaskan kepada kami sehingga kami juga punya kewenangan juga terkait dengan alokasi anggaran. Berikan kepada kami apa yang seharusnya terjadi atau semestinya terjadi atau idealnya seperti apa. Kami harus memutuskan itu Pak, jangan sampai kami punya asumsi macam-macam tetapi kemudian kami tidak dapat informasi dari teman-teman KKP terutama PSDKP. Kalau boleh diperkenankan, kalau memang ini sudah menjadi rahasia KKP kami hormati Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Menyambung Bapak Ichsan, ini nampaknya tidak ada sesuatu yang harus dirahasiakan Pak Ichsan. Kita minta justru karena ini yang dipakai adalah dana rakyat, maka akuntabilitas menjadi sebuah kemestian di dalam sebuah proses itu. Tidak ada yang dibilang rahasia internal dan lainnya sehingga kita perlu tahu hasil kajiannya mau diberhentikan atau diteruskan terkait dengan Satgas ini. Jadi saya pikir ini menjadi penting juga menimpali dari Bapak Ichsan. Tidak ada yang perlu dirahasiakan Bapak Ichsan menurut saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ngomongnya jangan ada dusta diantara kita, gitu ya ngomong saja.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Ketua, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Mungkin kita bisa merujuk kembali di beberapa Medsos yang disampaikan oleh Bapak Menteri diberbagai kesempatan. Pada intinya beliau tetap berkeinginan untuk bisa melanjutkan Satgas 115 dengan catatan SOP, Juknis ditinjau kembali. Kemudian penempatan personil tentu juga menjadi pertimbangan utama kedepan dan yang patut digarisbawahi tentu semuanya kita menunggu hasil akhir rekomendasi Bapak Menkopolhukam kepada Bapak Presiden tentang keberadaan Satgas ke depan.

Secara prinsip apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Satgas selama ini memang betul bahwa ini adalah memperkuat fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Begitu banyak *partnership* yang dibangun bukan saja di dalam negeri akan tetapi juga di luar negeri kita bisa banyak mendapatkan manfaat dengan keberadaan *network* yang berkembang dalam tim Satgas. Yang kedua, tentang penanganan masalah. Selama ini dengan adanya keberadaan satgas semua unsur ada berada di dalam satu ruangan yang sama, di meja yang sama dari KKP. Kemudian yang kedua, dari TNI AL, dari Bakamla, dari Pol Air, Kejaksaan Agung dan kadang-kadang Bareskrim pun, Kabarhakam pun juga hadir melakukan pembahasan di *around table discussion* dalam arti yang sesungguhnya, sehingga penanganannya tidak lagi terlalu birokratis sehingga cepat bisa diputuskan beberapa opsi kebijakan yang harus ditempuh dalam waktu yang lebih cepat.

Kemudian yang ketiga dengan adanya kordinasi di bawah payung Satgas memungkinkan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama juga dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tadi juga telah disampaikan adanya keluhan tentang tidak menyampaikan data produksi kapal penangkap ikan dan tidak menyampaikan pajak yang seharusnya dibayar dari pelaku usaha. Sekaligus menjawab pertanyaan sampai sejauhmana dampaknya kita juga memiliki data bahwa penerimaan pajak dari sektor perikanan di luar PNBPN juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha didorong sedemikian rupa sehingga mereka mulai melaporkan hasilnya dengan lebih baik. Kira-kira demikian.

KETUA RAPAT:

Ini bahasa canda saya saja, Satgas kita ini 115 atau nanti ada diganti Satgas apapun, menurut saya Satgas itu persyaratannya cuma dua Pak, satu budek yang kedua tidak bisa baca. Satu, budek apa? kalau melakukan operasi kalau ada yang nelepon tidak kedengaran. Yang kedua, tidak bisa baca kalau ada yang WA dia tidak bisa baca itu. Nah, orang yang begitulah yang dibutuhkan karena semakin kesini saya lihat sebenarnya kita ini satu saja nyalinya yang rendah kalau sudah ada telepon, kalau sudah ada yang

WA itu saja. Nah, yang mempertahankan kelautan kita menghadapi berbagai problem di Kelautan itu kan problemnya cuma itu. Koordinasi antara 3 instansi, 4 menurut saya yang seringkali dilapangan sudah punya jalurnya masing-masing, sudah punya wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua adalah kalau berhubungan dengan kapal asing nanti kita tinggal telinganya berani tidak ditelepon dimaki-maki, tidak dengar terus di WA tidak dibaca.

Menurut saya kalau hasil audit internalnya kita sampaikan kita problemnya apa sih, kan kalau ada yang nelepon resikonya kan berbagai resiko ancaman segala macam. Itulah problem kita hari ini setinggi teori apapun kita pas aplikasi dilapangan pasti yang dihadapi itu. Itu bukan hanya KKP, KLH juga sama itu problemnya.

Terima kasih,

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Saya jadi tertarik untuk bicara lagi setelah Bapak Pimpinan menyampaikan itu. Satgas ini apa sih alasannya dibubarkan atau seperti dihentikan kegiatannya, berarti kan ada masalah. Menurut saya Satgas ini jadi bagus malahan, nah ini bisa mengatasi terhadap problem yang saya sampaikan tadi kenapa kalau instansi lain tidak mau, karena permainan mereka disanalah itu tadi yang saya katakan bukan uang kecil Pak, berapa juta kapal, berapa ribu kapal yang diperes oleh mereka itu setiap berlajar gara-gara ijinnya tidak ada satu, itu puluhan juta Pak, seperti yang saya sampaikan tadi.

Oleh karena itu Bapak Pimpinan, mungkin ini kita perlu juga mengundang Panglima TNI atau KSAL dan Kapolri untuk membahas nasib nelayan kita. Dan persoalannya bukan tidak, persoalannya ada, kalau perlu kita hadirkan nelayannya nyogok-nyogok itu kita hadirkan dengan bukti-buktinya. Bagaimana negara ini mau bersih, bagaimana rakyat kita mau sejahtera kalau baru melangkah saja sudah dipersulit mengenai modal, ijin, kemudian di tengah laut jadi sapi perah. Saya rasa *clear* betul ini, jadi Satgas sangat penting karena itu menyelesaikan dalam satu meja dan apa yang disampaikan Pimpinan tadi betul, persoalannya disitu-situ saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Termasuk barangkali waktu itu saya menyampaikan itu ada 150 juta anak lobster yang lari keluar negeri kemudian uangnya sudah terverifikasi oleh PPATK sekian, saya bilang "selidiki", tapi sampai sekarang terus hilang. Artinya, pelaku ini kasat mata bisa terlihat akan tetapi tidak ada yang berani bertindak, intinya itu saja.

Silakan dilanjutkan Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya mau perdalam lagi ini tentang keberadaan Satgas 115. Agak menarik karena sepanjang sepengetahuan saya....

KETUA RAPAT:

Mohon Pak, kita jam 15.30 WIB Paripurna.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke, saya minta waktu 2 menit saja.

Karena 5 tahun ini kita berdebat terkait dengan keberadaan Satgas 115 ini. Menurut kajian internal ini bukan audit ya Pak, Satgas 115 ini pernah diaudit tidak Pak? diaudit oleh BPK, BPKP? Hanya internal dan eksternal. Pakai mic Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

BPK dan BPKP Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sudah ada ya, maksud saya begini Pak, pertama adalah yang kita ingin tanya apakah Satgas 115 tumpang tindih tidak kewenangannya dengan PSDKP, itu pertanyaannya. Kalau terjadi tumpang tindih berarti ada pemborosan anggaran Pak. Ini logika saya Pak.

Terus yang kedua adalah kalau memang perlu ada Satgas 115 seperti yang disampaikan oleh Bapak Firman tadi dimana kewenangan, batasannya. Karena disitu ada Bakamla, disitu ada Pol Airut, disitu ada Angkatan Laut. Kalau itu dijadikan satu Pak, lebih baik menurut saya itu tidak usah di KKP Pak, Menkopolhukam saja dalam pemahaman saya. Artinya, ini tumpang tindih ini Pak, dalam pemahaman saya. Makanya kemudian kalau memang itu ada audit BPKP, ada audit BPK misalnya, kalau hanya audit anggaran, tapi kan implikasi sama rangkap jabatan ini Pak, operasional dan sebagainya.

Nah, disitulah maksud saya kita minta kajian internal itu kalau misalnya Bapak Slamet menghendaki kemudian karena ini penggunaan anggaran APBN, ini uang rakyat, kita minta kajian internal itu nanti disampaikan secara tertulis Pak, biar kami baca satu per satu ketika Rapat Kerja nanti dengan Bapak Menteri, "Bapak Menteri, kami sudah baca ini kajiannya, kami minta agar apa keputusan, DPR RI punya keputusan, Pemerintah punya keputusan. Nanti kita sama-sama kita adu yang mana keputusan yang terbaik untuk rakyat. Itu Pak, maksud saya.

Itu mohon ijin Bapak Ketua, bukan ingin bertanya tapi kalau ada kajian internal secara tertulis kami disampaikan ke Komisi IV DPR RI, biar kami

pada saat Rapat Kerja nanti kami bisa menjelaskan dan meminta penjelasan lebih detail kepada Bapak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Secara prinsip apapun nama lembaganya kalau dianggap itu efektif dan memberikan kontribusi yang besar bagi melaksanakan tugas-tugas kelautan ada problem. Tetapi digabungkan kemudian dipimpin oleh seorang petinggi apapun kalau itu tidak jalan perahunya terlalu gede saya jadi masalah juga. Karena konsep Satgas ini bukan hanya dikelautan, ada Satgas Saber Pungli itu padahal sudah ada Polda, sudah ada Kajati, tetap saja ada Satgas.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nambahin Ketua, saya tambahkan saja bahwa ada Satgas 115 kan ada penggunaan anggaran di luar APBN ya Pak? tidak ada, dari hibah atau apa itu ada?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Tidak ada.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nah, ini kita minta klarifikasi Pak, nanti baru kita tanya. Nanti baru kita tanyakan kepada Bapak Menteri betul tidak selama ini Satgas 115 menggunakan anggaran diluar APBN. Kalau memang ada sampaikan saja, hibah pun tidak ada masalah bagi kami. Dari PNBP misalnya, PNBP pasti APBN Pak, tapi ada hibah atau loan atau apa begitu, kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa sampaikan saja.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti disampaikan.

Silakan Pak, diteruskan. Waktu kita sampai pukul 15.00 WIB ya.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih banyak Pak Ichsan, Bapak Ketua. Saya akan sampaikan nanti pada saatnya.

Baik, mohon ijin Bapak Ketua, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang khusus terkait dengan BLU LPMUKP saya mohon ijin apakah Bapak Sjarief Sharial diijinkan langsung memberikan jawaban, karena ini menyangkut masalah teknis.

KETUA RAPAT:

Kita tanya dulu Anggota, dipersilakan?

Iya silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, silakan Pak.

KETUA RAPAT:

5 menit ya Pak.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Bapak Sekjen.

Saya akan jawab pertanyaan per satu orang Anggota yang memberikan pertanyaan kepada kami. Untuk Ibu Riezky Aprilia kebetulan memang Sumsel itu telah kami realisasi penyalurannya 12 miliar belum ada NPL-nya Pak. Kami setuju pendampingannya itu perlu pasca pencairan memang ciri khas layanan BLU. Untuk Bapak Sutrisno, yang tadi pertanyaannya cukup kami menangkap kekhawatiran Bapak Sutrisno tentang banyaknya kegagalan kredit program sejenis seperti kredit usaha tani dan seterusnya. Tapi saat ini NPL non performing loan LPMUKP itu relative baik hari ini. Kita di bawah target Kemenkeu, Kemenkeu targetnya 5% kita 2,7%. 2,7% itu belum termasuk restrukturisasi kalau karena ada usahah yang gagal itu gara-gara badai, banjir, kemarau panjang, itu mungkin belum kami masukkan.

Mungkin kegagalan program terdahulu yang Bapak sampaikan gara-gara pendamping itu juga kami sepakat. Memang ada kemungkinan pendamping kita nakal dilapangan, tapi seluruh proposal 100% itu dianalisis oleh analisis kredit Pak. Tapi ada kemungkinan juga kongkalikong misalkan 30% itu diperiksa oleh SPI BLU Pak, satuan pemeriksa intern BLU. Jadi *alhamdulillah*-nya kita, kita masih bisa maintance mungkin sekitar 1% sampai 2% NPL Pak, untuk LPMUKP untuk net setelah restrukturisasi.

Untuk anggaran yang tidak terpakai memang itu tahun 2019 itu SDM kita baru disetujuinya itu akhir 2019 Pak. Jadi SDM kita kurang, jadi penyerapannya rendah. Target kita itu tadinya 640 miliar, terealisasinya 186 miliar, karena kita hati-hati juga ketimbang kita paksakan takutnya malah

berbahaya. Nah, kenapa kita usulkan untuk tahun 2021, kita tahun ini target 725 miliar. Nah, kalau kita tidak dapat tambahan dana semester I tahun 2021 itu dana kami habis Pak, untuk penyaluran. Dibandingkan dengan kebutuhan jadi kalau kami dapat tambahan dana itu lebih baik, kalau tidak berarti kita menyalurkan atas pengembalian yang kembali kepada kita.

Pak Abdullah Tuastikal tadi untuk Maluku, terima kasih Pak, untuk kebutuhan tenaga pendampingnya akan kami memang sudah masuk rencana dan kita akan penuh Maluku. Kemudian terkait dana bergulir pada orang yang sama memang sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, penambahan pada debitur yang sama itu hanya bisa satu kali, tidak boleh lebih. Nah, untuk yang sudah kita salurkan 409 miliar yang balik itu 86 miliar Pak, dan kita dapat salurkan kembali.

Pertanyaan Bapak Budhy Setiawan untuk mengenai apa saja kriteria, memang kita mengikuti gaya bank juga 5C tapi yang utama karakter, kolateral ada tapi lunak berbagai macam bentuk, kapal bisa jadi kolateral. Tapi kalau karakter tidak bisa diganggu gugat Pak.

Mungkin Pak Guntur untuk wilayah Jombang, Nganjuk, Mojokerto, juga sudah masuk dalam rencana kami. Pak Ibnu, sumber dana kami ini berasal dari BABUN 999.03 Pak, investasi Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ini sebentar, ini Bapak Wakil Ketua ingin nanya kantornya dimana katanya gitu?

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Kantor kami di KKP Pak, di Kementerian Kelautan dan Perikanan GMB II Lantai 17 Bapak. Di daerah ada kantor pendamping itu bekerja sama dengan dinas, terutama di kantor penyuluh Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Direktur, nanti dibuka di Probolinggo Pak.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Oh, sudah Pak, Probolinggo lancar Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh, sudah di Probolinggo tapi orangnya tidak tahu Pak.

KETUA RAPAT:

Kerawang ada tidak, sama Bekasi dan Subang.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Oh, sudah Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bahaya Probolinggo sudah ada kantornya, tapi orangnya tidak tahu ini Pak.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Tadi Pak Ibnu tanya juga, saya terus saja LPMUKP ini pejabatnya non structural Pak, di bawah Menteri tetapi melaporkannya melalui Bapak Sekjen. Jadi secara administrasi melalui Bapak Sekjen. Jadi secara administrasi saya bertanggungjawab terhadap Bapak Sekjen Pak.

Kemudian untuk Bapak Mindo, pertanyaan Bapak Mindo tadi untuk ada di slide untuk tangkap dan budidaya ada pembagiannya. Tapi untuk budidaya itu memang terbagi budidaya air tawar, air payau, dan laut. Terus terang saja tingkat NPL-nya mengikuti saja Pak, tadi untuk menjawab yang tangkap maupun budidaya itu sama-sama juga polanya. Jadi sekali lagi bahwa ada kemungkinan kalau yang di budidaya air tawar itu ketakutan kita adalah banjir sebenarnya Pak, yang air payau itu ketakutan kita adalah rob. Di danau juga ada Pak, di tempat Bapak di Purwakarta.

Ijin Bapak, sebagian Anggota Komisi IV DPR RI sudah jalan dan sebagian belum. Nanti kalau Bapak-bapak ingin lihat program ini boleh Pak, sama kami baik di tahap awal maupun sudah tahap yang sudah ini.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ijin Pak, sebentar Pak.

Ini kebetulan budidaya air tawar, jadi kita memanfaatkan keunggulan komparatif kita. Jadi jangan dibiyah uyah begitu ya, jangan semua lele, karena kalian juga mengikuti lele mengikuti kemampuan orang yang ekonominya sangat terbatas. Lele yang enak itu satu kilo itu paling tidak 6 ekor, tapi yang dijual yang 1kilo 10 sampai 12 ekor, karena itu cocok untuk pecel lele satu komplit Rp15.000 tapi kan kelezatannya belum disitu. Nah, kementerian itu juga harus mengarahkan orang lebih baik dari situ.

Dalam kaitan ini saya minta anggaran khusus bagaimana kita membesarkan sidak, supaya keunggulan komparatif ini ada gunannya paling tidak buat masyarakat pesisir, masyarakat nelayan. Saya ingin Bapak lakukan itu di tempat Bapak, Kementerian ini dalam tahun ini, jangan sampao Bapak kalah terlambat dengan rencana saya sama Bapak Slamet. Jadi PDI Perjuangan dan PKS sepakat kita mari kita buat ini. Kita lihat dulu Kementerian ini bisa jalan tidak, begitu ya. Itu satu.

Yang kedua, saya bersyukur dalam rangka pembesaran belum sampai ke budidaya, wacana mengeksport benurnya udang lobster tidak jadi. Tetapi ada kelihatannya masih miring-miring ini, masih miring-miring, selektif, jangan pakai kata-kata selektif. Kalau tidak ya tidak saja, kalau berikan ya berikan saja, saya mengatakan tidak. Jadi jangan sampai lobster ini sebagian kita besarkanlah katanya sebagian kita kasih pengusaha sambil belajar, tidak perlu uang negara berikan buat rakyat, belajarkanlah membesarkannya. Tidak benar jalan pikiran itu, termasuk pengarah-pengarah yang sekarang itu keliru berpikir. Termasuk itu, 9 arah barunya itu, itu memberikan kesempatan sebagian bisa ekspor omong kosong itu bisa seperti itu Pak. Larang saja, keluarkan uang untuk belajar bagaimana membesarkan lobster itu di dalam negeri. Saya kira itu yang mau saya sampaikan terkait dengan BLU.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih ya.

Bapak dengan saya satu energi untuk itu, katakan tidak untuk lobster dilihat dari ekspor maksudnya, kan sudah tahu beritanya. Memang kita ini Pak, saya bolehlah sedikit cuci pikiran deh, tidak ada satupun negara di dunia yang mengalami kemakmuran karena eksploitasi yang besar-besaran. Tetapi negara-negara yang melindungi sumber dayanya dengan baik rata-rata makmur Pak, karena eksploitasi hubungan dengan cukong, hubungannya dengan Pokoknya uang yang itu tidak berkah Pak, dapat banyak terus stroke rugi deh. Lebih baik gaji besar, istri 4, umur 120 tahun, iya kan daripada gaji kecil tapi stroke.

Terima kasih, lanjutkan.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Ijin lanjut Pak Pimpinan.

Bapak Mindo terima kasih untuk Sidak Pak, mudah-mudahan kami juga bisa menunjukkan kepada Bapak apa yang bisa kami biayai Pak, untuk Sidak, bisa kita ekspor Pak.

Kemudian untuk Bapak Suhardi Duka, terima kasih dukungan Bapak untuk program ini. Masukan Bapak tentang perorangan itu memang salah satu yang kita tampilkan, karena memang setiap daerah ini memiliki karakteristik beda-beda secara antropologinya, sosiologinya. Ada yang usahanya usaha kelompok, ada juga yang kelompok usaha. Kalau kelompok usaha itu setiap orang bisnis sendiri-sendiri, tapi bentuk kelompok. Tapi ada usaha kelompok memang usahanya berbarengan, tapi kita tergantung sangat kasuistik daerah.

Tapi untuk Sulbar tadi Bapak masukan pendamping yang tadi LSM Puang tadi Pak, ijin kami juga akan tadi saya sudah memerintahkan untuk laporkan ke pendamping kami disana Pak. Juga untuk rumput laut termasuk

pembiayaan Pak, memang rumput laut ini agak sedikit karakteristiknya agak kami hati-hati juga karena dia cepat panennya juga. Kami guna memperkuat gudangnya Pak, supaya gudang itu bisa membeli rumput laut para petambak. Jadi ada jaminan harga beli, termasuk di garam. Garam itu kami memperkuat gudangnya, supaya ada jaminan harga juga untuk ditingkat petambaknya.

Untuk Bapak Ichsan, tadi 3% per tahun tingkat bunga BLU. Dan memang agak tadi saya sebutkan juga ada beberapa debitor kami karakteristiknya itu pinjaman itu pribadi-pribadi tapi kita kelompokkan pas akadnya, supaya murah juga biayanya. Itu tergantung karakteristik debitor juga.

Ibu Alien, itu saya juga sudah....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Direktur, saya mau tanya tapi *clear* 3% ya, mau pribadi mau itu kelompok 3%, *clear* ya Pak?

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan itu 4% Pak, PMK 100 tapi atas arahan Presiden pada saat peluncuran bank mikro nelayan itu 3% per tahun.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak, kalau bisa buku panduannya dibagikan kepada teman-teman Komisi IV DPR RI karena biar sosialisasi ke Dapil, terutama ke Probolinggo Pak, walaupun ada kantornya disana tapi beliaunya tidak tahu, bukunya penting Pak. Karena Bupatiya itu kayaknya konsen betul sama urusan ini Pak.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Siap Bapak, kalau bisa saya temani saya akan temani Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, ijin Pak.

Waktunya pukul 15.00 WIB, agar efektif gini saja deh, kita tanyain nomor WA-nya, dibagikan kepada Anggota nanti penjelasannya via WA lebih efektif. Sekarang pukul 15.00 WIB kita kasih tambahan waktu berapa menit, untuk semuanya kan harus kesimpulan. Tambah 10 menit setuju tidak? Jadi 15.10 WIB sudah selesai kita langsung Paripurna, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Saya ijin Pak, untuk Ibu Luluk tadi sudah melihat saya soalnya. Tadi sebenarnya Wonogiri itu masuk wilayah kami sebelumnya, tapi tidak ada. Jadi karena memang ada dinamisasi disitu, tapi tahun 2020 saya sudah memasukkan Ibu, untuk Wonogiri, Sragen dan Karanganyar itu untuk menjadi lokasi layanan. Memang disana budidaya air tawarnya baik-baik.

Kemudian untuk Bapak Firman Soebagyo saya pikir tadi masuknya terima kasih untuk ininya. Untuk berapa targetnya setiap lokasi sebenarnya kami punya indikatif, kalau tahun 2020 ini Rp3 miliar per LLP, indikatif kami Pak. Tapi sebenarnya kita punya cadangan itu sampai Rp4 miliar per LLP lokasi layanan. Tapi tentu yang masuk itu tergantung proposalnya ya Pak, yang masuk kelayakan usahanya dan seterusnya.

Mungkin demikian dari saya Pak, untuk jawabnya.

Terima kasih, saya kembalikan.

*Wallahu Ila Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu, forum ini forum terbuka santai saja, kalau bicara pekerjaan, keinginan Pimpinan, politik. Saya tahu wajah pegawai itu saya tahu, psikologinya saya tahu antara mengiyakan dengan hati yang bergejolak itu saya tahu, Cuma satu yang namanya Pegawai Negeri itu siapa kokinya, siapa pesanannya ya harus iya tidak bisa berkata tidak. Tapi hati nurani kan tidak bisa dibohongi, sehingga Bapak tenang saja kalau ada hal yang susah banyak pikiran Bapak yang sama dengan saya dan dengan teman-teman. Yang beda Cuma kedudukan, Bapak disana saya disini, sehingga saya pun tidak berani keras-keras dan marah-marah karena takut suatu saat saya disana. Iya, tepuk tangan dong, hidup harus begitu, benar tidak, yang penting objektif, semuanya diniatkan untuk kebaikan masyarakat, untuk negara tidak muter-muter itu saja ya, muter itu capek. Bapak juga mutasi muter-muter capek.

Baik, kita simpulkan setuju tidak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Nambah Pak.

KETUA RAPAT:

Boleh, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Karena aspirasi, yang pertama tidak panjang BLU tadi batas minimal berapa, belum kan tadi. Batas minimal pinjaman dan maksimal, ini penting. Yang kedua, dalam hal pendampingan ini Pak, saya ingin mengangkat marwah nelayan. Nelayan ini kelompok manusia yang tidak dipercaya oleh banker, ini dianggap ini manusia yang tidak jujur, mari kita angkat martabat beliau-beliau nelayan ini. Indonesia ini akan adil dan makmur sejahtera tatkala nelayan dan petani itu berdaya, selesai sebenarnya tidak usah nuklir dan seterusnya.

Saya ingin mengangkat nelayan ini Pak, bagaimana manusia yang menjadi kepanjangan tangan dari BLU Pusat di daerah yang saya baru tahu kalau kantornya nitip ke Dinas Perikanan ya Pak, baru tahu sekarang ini. Nanti saya cari tahu di Bupatinya nanti, saya interogasi.

KETUA RAPAT:

Ijin, mohon diperjelas Pimpinan, bupatinya siapa ya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Makanya saya tidak bisa mengolah retorika Pak, karena samalah nasibnya sana, setelah eksekutif, legislative. Jadi mau bangun opini, isu sudah kehilangan isulah, selesailah persoalan isu, Ibu Luluk yang punya kayak isu, karena belum pernah jadi Bupati kan.

Bentuk pendampingan sampai dengan daerah, rekrutlah anak muda agar supaya penggelontorannya dananya betul-betul sampai kepada nelayan yang membutuhkan. Dan pelatihan bagaimana cara membayar yang baik dan seterusnya. Terus terang rentenir ini hari ini berada di nelayan, di pasar Sudha banyak yang berkurang karena BMT dan seterusnya, para Bupati sudah konsen bagaimana mengamalkan ayat Allah itu, *Wa ahallallahul bai'a Wa harromar ribaa*, kata Bapak Dedi saya hanya menyambungkan saja. Ini bagaimana nelayan inikan misi Bapak Sekjen kan, inovasi disitu sudah keren Pak, tidak usah inovasi yang lain.

Yang kedua, istri nelayan ini penting diberdayakan. Saya pada jalan provinsi coba cek, Bapak lewat Probolinggo ada kampung asap *subhanallah* Ibu-ibu begitu terampilnya dan semangatnya mencari rezeki tambahan suami dengan mengipas hasil tangkapan suaminya itu sehingga menjadi jalan kampung asap disana, semua manusia yang lewat Probolinggo menuju Banyuwangi dari Bali dan seterusnya itu pasti mampir kesana. Apalagi PNS Pemda mau pulang ke rumah sore daripada ribet memasak itu beli pasti. Bukan nelayan perempuan, emak-emak istri nelayan. Ini coba ini disentuh, luar biasa ini.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua, kampung asapnya persisnya dimana Pak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Di jalan Probolinggo Pak. Gunung Betar tahu Pak, sebelum Bentar itu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Bapak Pimpinan, Bapak itu pernah Bupati di Probolinggo, jangan bilang sebelah sana sebelah sini. Kita tidak mengerti.

KETUA RAPAT:

Saya juga tahu Pak, dia itu lagi memperjuangkan siapa saya tidak tahu Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Dapil saya itu Pasuran, Probolinggo Pak. Ini suruh buka-buka, ya istri saya Bupati lah Pak, sudah 2 periode, kalau Bapak Dedi masih 1 periode istrinya.

KETUA RAPAT:

1 tahun.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Oh, 1 tahun kalau istri sudah 6 tahun Pak.

Itu dua, titip dua ini saja Pak, nelayan itu sendiri, bagaimana dia itu stempelnya sudah bukan penipu oleh banker. Nah, berdayakan itu tugas sampean ini. Yang kedua, emak-emak tadi.

Yang ketiga, saya ingin ada saham Pak, selama ini Bansos perikanan, dipertanian begitu juga oleh kelompok nelayan. Siapa yang memperoleh perahu dan alat-alat itu semua, para majikan. Anggotanya adalah pekerjanya, buruhnya, sehingga yang kaya tetap kaya, buruh tetap miskin. Ini bagaimana membangun keseimbangan manusia yang pekerja ini saya ingin mengangkat itu, bagaimana bantuan ini berikan kepada Bumdes. Melanggarkah aturan kalau Bansos itu saya berikan kepada Bumdes bukan lagi kepada kelompok nelayan. Kalau boleh saya memilih Bumdes, agar supaya nelayan tatkala ingin menangkap dengan perahu yang kita bantu itu sewanya ke Bumdes, bukan lai dari dia, dipakai dia, pekerjaannya tetap bekerja kepada dia, kepada

mereka ini. Tiga hal itu tidak sampai dengan 3 menit. Saya ingin jawaban yang jelas terhadap komentarnya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Bapak Dedi, Bapak Pimpinan, menguatkan saja. Kita sudah satu pemahaman dengan Kementerian Pertanian, bahwa pupuk akan dilewatkan Bumdes untuk masyarakat setempat. Jadi kalau tadi ada pikiran Bumdes juga mendapatkan Bansos terkait ini mestinya didorong juga kearah sana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Pak, sudah masuk 15 menit, 10 menit lagi deh.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Wakil Ketua, Bapak Pimpinan, serta Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya menyambut baik usulan Bapak, yang pertama tentang Bumdes saya pikir Bapak Mindo ini juga usulan yang harus menjadi perhatian kita. Kita menginginkan semua bantuan Pemerintah harus tepat sasaran dan bermanfaat, itu yang paling penting.

Kemudian yang kedua, apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai target kita merubah menstransformasi nelayan, stereotip di perbankan begitu negative ini tentu menjadi tugas kita untuk bisa kita kerjakan. Dan yang kedua, saya sangat setuju dan sependapat mengenai peran ibu-ibu nelayan untuk terus kita berikan dukungan melalui usaha ekonomi terutama dipemasaran pengolahan hasil perikanan sudah kita lakukan dan kita akan terus dorong untuk bisa dilakukan. Terima kasih Pak, dan mohon dukungannya untuk bisa mengesekusi 3 hal tadi.

Terima kasih.

Boleh lanjut sekarang Bapak Sjarief Sharil menjelaskan terkait dengan BLU, minimum dan maksimumnya.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Baik Bapak, untuk batas minimum pinjaman itu tidak kami atur Bapak, karena minimum yang 5 juta juga ada pinjam, 15 juta juga ada, jadi tidak kami atur. Minimum tidak kami atur, yang maksimum itu kami mengatur di internal itu kami bagi dua hal Pak. Secara rata-rata per orang kami maksimum itu 500

juta, supaya kecil. Tapi kecuali program prioritas Kementerian, contohnya ganti alat tangkap, ganti alat tangkap itukan cantrang waktu itu tidak mungkin 500 juta. Kemudian waktu kemarin itu ada sekali lagi kalau karakternya masih bagus kami masih bisa, tapi kalau karakternya buruk kami tidak bisa. Inikan karena pergantian kebijakan kementerian ya Pak, waktu itu.

Nah, kemudian untuk tetapi rata-rata pinjaman kita per orang itu 31 juta hari ini, jadi di bawah 50 juta rata-rata. Jadi kalau kita atur terlalu ketat, tiba-tiba kita meleset kita jadi temuan, itu juga yang kami hitung, tapi kalau yang kami aturnya sekarang kita 500 juta, kecuali program prioritas Kementerian lainnya.

Terima kasih Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Yang terakhir, aspirasi teman-teman sudah, Ibu Luluk masih.

DIREKTUR LPMUKP (SYARIF SYAHRIAL, S.E., M.SE.):

Yang per-user ya Ibu, per pengguna itu saat ini rata-rata data kita actual, actual data itu 31 juta per pengguna, mitranya ada sekitar 800. Tetapi kalau ditanya pas pengaturan di internal kami, kami targetnya 500 juta supaya pinjamannya kecil di bawah. Artinya, boleh 500 juta pinjaman perorangan, maksimum 500 juta, kecuali program prioritas kementerian, walaupun dalam kenyataannya 31 juta, tidak lebih dari 50 juta.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Yang terakhir Pak, saya menyambung apa karena saya fasilitator kan Pimpinan. Bapak Slamet dan Mas Ichsan tentang jumlah nelayan, berkurang atau berkurang? Menurut Bapak Sekejn kan tadi bertambah. Saya ingin bagaimana ada proses regenerasi nelayan ini. Saran saya Pak, segera dirikan SMK di seluruh pinggir pantai itu Pak, SMK ada kaitannya dengan nelayan karena SDM Nelayan sebagaimana disimpulkan teman-teman ini mayoritas lulusannya SMP, kan mayoritas SMP Pak, tidak berdaya mau ke SMA dia di pulau. Bupatiya tidak peduli kepada pendidikan, bagaimana kementerian ini lakukan sinkronisasi berbagi lah, Gubernur lahan, Bupatiya infrstrukturnya, SDM-nya oleh kementerian. Ini akan sebuah proses percepatan regenerasi anak muda yang berilmu.

Yang kedua, salah hormat dari teman-teman ini Kementerian KLHK telah selesai komitmennya membantu mensosialisasikan programnya. Mau reses ini Pak, ini semua Anggota Komisi IV DPR RI mau reses di akhir bulan Februari. Komitmen kementerian kan harus jelas kepada kita, kebijakan apa yang akan dibantu oleh teman-teman sebagai mitra. Kita inikan mitra bukan lawan tanding untuk dibawa oleh seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Melalui meja Pimpinan saya mendesak kepada Kementerian Kelautan ini, KKP ini untuk segera merapat kepada Pimpinan dan Kapoksi, kan cukup jelas kan. Menteri Pertanian ini Senin sudah selesai, kalau budaya sudah selesai Pak, malah TA masing-masing ini sudah dipanggil diajak rapat sinkronisasi untuk masyarakat di seluruh Dapil Anggota yang terhormat DPR RI. Ini pesan Anggota yang masuk kepada redaksi Pimpinan. Cocok, segera disimpulkan, kami kembalikan karena sudah cocok. Saya kembalikan kepada Bapak Dedi.

KETUA RAPAT:

Ya baik, terima kasih atas kejujurannya, bahwa semua orang harus membawa cinta ketika nanti reses pergi ke pinggir pantai, ke danau kan harus membawa cinta, agar nanti saling mencintai. Kalau sudah tidak dicintai kan nanti juga kami mendoakan Bapak yang di depan Eselonnya cepat naik lagi.

Terima kasih, kita simpulkan sudah lebih....

F-PG (ALIEN MUS):

Pimpinan, ijin sebelum kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Apa lagi?

F-PG (ALIEN MUS):

Tidak, ini hanya menyampaikan saja.

KETUA RAPAT:

Boleh, ntar lah sore ini.

F-PG (ALIEN MUS):

Tidak, ini langsung saja karena mungkin, ijin Pimpinan melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Dirjen juga beberapa hari yang lalu, minggu lalu, Bapak Menteri sudah bertemu dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam acara festival nelayan di Provinsi Maluku Utara. Tolong dengan sangat agar kesediaan waktu untuk Pak Menteri bisa hadir dalam festival tersebut, karena festival tersebut tidak meminta anggaran tetapi mereka menginginkan Bapak Menteri bisa hadir bersama dengan Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, bila perlu Komisi IV DPR RI punya Kunspek juga, bisa Kunspek di negeri kami yang lumbung ikan nasional tetapi perlu perhatian dan atensi dari Bapak Menteri KKP. Begitu saja Bapak.

Karena Bapak Menteri kalau tidak salah ada schedule ke Sulawesi Utara. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada kami agar bisa disampaikan

kepada Bapak Menteri kalau bisa seandainya bisa dari Sulawesi Utara itukan cuma 45 menit ke Maluku Utara. Jadi luangkan lah waktu untuk datang ke negeri kami.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih nanti disampaikan kepada Bapak Menteri dan dijadwalkan.

Baik, kita mulai coba layarnya dilihatin

Kesimpulan atau keputusan, sudah siap belum?

Sudah.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas penanganan *Illegal Unreported and Inregulated Fishing* atau IUU Fishing. Dan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ini disepakati?

Bapak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Mohon ijin, ada *mainner* saja kecil “ilegal koma”, selebihnya betul, setuju Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oh, pakai koma saja.
Sudah?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mempergunakan anggaran satuan tugas 115 sebesar Rp45 miliar yang digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan, seperti hari layar, armada kapal, sumber daya manusia dan fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan pencegahan IUU Fishing di wilayah Indonesia sehingga

sumber daya kelautan dan perikanan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh rakyat Indonesia.

Ini setuju ini yang Rp45 miliar?

F-PG (ALIEN MUS):

Itu usulan saya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya nanti yang lain setuju tidak?

Pak Wakil setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengikutsertakan dan melibatkan peran serta masyarakat tradisional pesisir khususnya nelayan yang mempunyai aktifitas melaut, sehingga batas wilayah penangkapan perikanan guna membantu mengawal dan menjaga kedaulatan wilayah perikanan Indonesia di zona ekonomi eksklusif atau ZEE.

Bapak setuju tidak ini?

Terus ada tambahan juga Pak, itu daerah-daerah nelayan tradisional adat itu relative baik pengelolaan pinggir pantainya dan mereka harus diperluas dan dicegah dari intervensi dari tempat lain. Itu saran saya, itu memang tugas Bapak.

Setuju pengawasan?

Oke, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan LPMUKP dapat memberikan kemudahan akses pinjaman permodalan secara Kepada pelaku utama, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar ikan. Termasuk ke Badan Usaha milik desa atau Bumdes mengingat selama ini pelaku usaha kelautan perikanan kesulitan mengakses pembiayaan melalui bank konvensional.

Tadi yang Bapak Wakil menyampaikan bukan nelayan yang penjahat perbankan tapi yang pinjem triliun-triliun dan ratusan triliun tapi tidak bayar. Dan itu bukan nelayan tetapi saya tidak tahu.

4. Komisi IV DPR RI mendorong lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan LPMUKP dapat memberikan kemudahan akses pinjaman permodalan secara Kepada pelaku utama, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar ikan. Termasuk ke Badan Usaha milik desa atau Bumdes mengingat selama ini pelaku usaha kelautan perikanan kesulitan mengakses pembiayaan melalui bank konvensional karena dinilai beresiko tinggi agar pelaku usaha merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha berkelanjutan.

Setuju?

Tambah Bapak Soebagyo bagaimana?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin mendorong itu diganti mendukung lebih tepat. Mendorong kayak gerobak saja.

KETUA RAPAT:

Iya, mendukung oke.

Bapak Sekjen bagaimana?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Kalau setuju pakai mic Pak, kan direkam ini sebagai bukti bahwa tidak sepihak kita.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Pak Sekjen itu belum Komisi IV DPR RI, jadi tidak perlu kalian tanya. Karena itu pendapat Komisi IV DPR RI, Komisi IV DPR RI mendukung, Komisi IV DPR RI mendorong, mereka belum Komisi IV DPR RI. Jadi tanyanya kesini, oke.

KETUA RAPAT:

Oke, siap.

Pokoknya bagaimana mbah saja, saya mah sok saja, yang penting cair, karena ikan laut cair.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Ini rapat yang paling santai ya ini.

5. Komisi IV DPR RI mendukung LPMUKP untuk memperkuat tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia agar mampu memberikan pemahaman mengenai skema pinjaman ke calon debitur/nasabah secara utuh.

Setuju?

Tenaga pendampingnya nanti dari mana?

Oh, mendukung ya sudah cuma nanya. Sepakat tidak Bapak, Bapak setuju, kalau tidak setuju tidak apa-apa Pak, jangan saja.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Nomor 5 seandainya kalimatnya berhenti dimendukung tanpa dan meminta itupun sudah kami lakukan Pak. Kami terima kasih, kami mendapatkan dukungan di paragraph nomor 5 ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, segitu nanti diperbaiki kalimatnya gampang. Setuju tidak?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta LPMUKP untuk menyampaikan laporan evaluasi penyaluran modal sejak berdirinya LPMUKP sehingga tahun 2019 agar kedepan dapat memacu peningkatan penyaluran pinjaman pemodalannya kepada masyarakat kelautan perikanan.

Setuju, Pak aman ini?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta data-data dan jawaban tertulis kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan atas Rapat Dengar Pendapat atau RDP pada tanggal 6 Februari 2020 yang membahas tentang penanganan *Illegal Unreported and Inregulated Fishing* atau IUU Fishing dan bantuan peningkatan permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk audit Satgas 115 dari temuan BPK dan BPKP sebelum Rapat Dengar Pendapat mengenai program kegiatan 2020.

Ini oke?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Ada satu hal yang ingin kami masukkan tetapi apakah masuk di 7 atau pasal terpisah yang itu terkait dengan misalnya penanganan IUU Fishing ini. Dari sejak awal sampai akhir sebenarnya kan ada instansi lain yang itu sangat terkait dengan penanganan pencegahan dan penindakan, misalnya soal TNI, kemudian Bakamla atau Polri. Apakah sekiranya ini dimungkinkan di forum ini kita putuskan, kita juga perlu untuk menghadirkan instansi itu untuk rapat bareng disini. Karena tidak mungkin hanya dengan sepihak antara kita dengan KPP saja, padahal ada instansi lain yang itu terkait.

KETUA RAPAT:

Bisa dimasukkan saja, selanjutnya Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan instansi lain. Tinggal dibikin rapat menjadi keputusan Pimpinan.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa lagi?

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Kalau misalnya terakhir itu sebelum Rapat Dengar Pendapat, itu rasanya bisa 1 jam sebelumnya, jadi bagaimana kita mau pelajari itu. Jadi harus ada waktu yang jelas, atukah 2 minggu....

KETUA RAPAT:

4 hari sebelum Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen yang saya hormati.

Ini seluruhnya disepakati kan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Sekjen silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan paragraph 7 di penutup dua kalimat terakhir “termasuk aduit Satgas 115 dari temuan BPK dan BPKP sebelum Rapat Dengar Pendapat dan seterusnya”. Tentu hal ini masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ichsan sebelumnya. Saya khawatir kalau untuk menjawab pertanyaan kunci tumpang tindih ada atau tidak antara PSKP dengan Satgas, saya kurang yakin kalau ada di dalam audit Satgas 115. Umumnya biasanya menyangkut laporan keuangan yang ada di wilayah tersebut.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, terkait dengan temuan BPK dan BPKP ini *it's oke* kalau kemudian anggaran keuangan. Tapi yang analisis keberadaan Satgas 115 yang kajian internal yang tadi kita sampaikan itu, itu tolong sampaikan juga secara tertulis Pak. Karena saya hanya mengutip kata-kata Pak Slamet tadi, bahwa inikan anggaran penggunaannya kan anggaran APBN Pak, uang rakyat. Kita juga punya hak untuk mengetahui terkait dengan keberadaan Satgas 115. Point yang audit Satgas BPK dan BPKP itu okelah terkait dengan anggaran, tapi ada juga kinerjanya sepengetahuan saya, BPK dan BPKP juga ada. Tapi yang kita butuhkan adalah analisis terkait dengan keberadaan Satgas 115 itu yang kemudian nanti pada saat Rapat Kerja kami akan memutuskan apakah Satgas 115 itu perlu dilanjutkan atau tidak, walaupun itu kewenangan Pemerintah, tapi kami di DPR RI karena punya ada anggaran disitu yang tahun 2020 Rp45 miliar itu kami punya keputusan disitu. Itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Ibu sebelum kita tutup.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bapak Pimpinan, mungkin saya sepakat dengan Mbak Luluk tadi bahwa untuk mengundang instansi terkait tadi itu masuk dalam kesimpulan rapat ini. Karena ini yang akan menjawab kegamangan Bapak Ichsan tadi tentang tumpang tindih tadi. evaluasi inikan dilakukan, mungkin nanti setelah kita mengundang rapat, panglima, dan KSHL itu mungkin kita bisa menyimpulkan dan mungkin itu juga bisa menjadi kesimpulan kepada KKP tentang Satgas ini perlunya diperkuat atau di bubarkan.

Kami melihat dilapangan bahwa Satgas itu penting, karena memang tugas dan fungsinya seperti yang disampaikan tadi, karena memang banyaknya mereka-mereka itu bermain disitu. Ini seperti pencurian pasir Pak, pencurian pasir juga begitu, kalau kita bicara pencurian pasir yang paling depan nolak itu adalah TNI AL dengan mengatakan “demi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tapi diam-diam mereka itu mengontrol, mengawasi dan itu orang nyuri pasar disedot didiamkan saja karena setorannya jalan terus, mohon maaf.

Jadi saya rasa ini masuk di kesimpulan supaya kuat nanti untuk menjadi dasar pemanggilan.

KETUA RAPAT:

Ya sudah tinggal dimasukkan kalimatnya saja, kalimatnya untuk digelar rapat dengan instansi lain.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Konkritnya Ketua, konkritnya di point 8 saja, “Komisi IV DPR RI akan mengundang rapat para stake holder terkait dengan pemberantasan IUU Fishing, terdiri dari TNI AL, Bakamla dan sebagainya”.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ntar dulu, dicatat dulu Ketua, sabar dulu, jamnya juga kecepatan 15 menit Bapak Ketua yang saya tahu, ini rahasia sekretariat sebenarnya tapi saya sampaikan saja di rapat. “akan menyelenggarakan rapat gabungan dengan para stake holder terkait dengan penanganan *Illegal Unreported and Inregulated Fishing* atau IUU Fishing pada Masa Sidang berikutnya”. Mohon maaf kalimat saya agak kurang ini karena bahasa Indonesia saya dapat D waktu kuliah Bapak Ketua, mohon dimaklumi. Jadi tolong diatur saja bahasanya.

KETUA RAPAT:

Baik, yang nomor 8 bisa disepekat?

Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Tidak ada tanggapan?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebagai catatan supaya tidak ragu-ragu dari tamu dari Kediri ini, saudara-saudara tidak berhak mewakili Pemerintah, karena itu tidak ada kesepatan antara DPR RI dengan saudara-saudara. Yang berhak mewakili Pemerintah dalam hal ini mewakili Presiden itu hanya Menteri Kelautan dan Perikanan, anda sekalian membantu Menteri Kelautan. Karena itulah kalimatnya seperti itu, Komisi IV DPR RI mendukung, Komisi IV DPR RI sepakat, kami yang sepakat tetapi ditunjukkan di dalam forum ini.

Terima kasih, biar paham kita sama-sama ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mbah kita sudah ngomong bagaimana melindungi Bapak Dirjen tentang keputusan-keputusan politik besar yang seharusnya ini ranahnya para pengambil keputusan politik di negeri ini. Dan semuanya untuk mengamankan Bapak-bapak agar tidak disalahkan, saya tahu itu. Tapuk tangan dong bagaimana baiknya Komisi IV DPR RI ini adalah orang baik-baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikianlah....

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Mohon ijin, terkait dengan paragraph 7 Pak Ichsan boleh saya koreksi. Terkait dengan audit BPK dan BPKP kalau boleh saran diganti kalimatnya dengan "menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Satgas 115".

KETUA RAPAT:

Oke, boleh.

Setuju, tinggal diperbaiki saja kalimat BPK dan BPKP-nya dihapus.

Oke, ingat ya kalimat BPK dan BPKP dihapus.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Termasuk laporan hasil evaluasi Satgas 115, auditnya dibuang, “hasil evaluasi Satgas 115 sebelum rapat”.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Iya, siap betul Bapak Ketua, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup tidak ada tambahan?

Kita ucapkan terima kasih dan Rapat Dengar Pendapat ini. Oh, iya sudah Pak, tadi. Tidak ada *closing* lagi kan? Bapak ada *closing* penutup? Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sebentar Pimpinan, saya masih agak mengganjal terkait dengan opsi 7 tadi, ketika kemudian dari pihak KKP keberatan untuk kemudian menyantumkan permintaan kita terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP. Karena dalam tataran fungsi kita juga punya fungsi pengawasan, sehingga kalau hasil itu tidak boleh diketahui oleh kita, kita mau ngawasi apa. Sehingga tidak hanya audit internal termasuk hasil itu kita punya hak untuk kemudian mengetahui itu, nampaknya perlu diperjelas.

Itu saja Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Slamet.

Kami mengusulkan untuk memperbaiki narasi paragraph 7 khusus terkait dengan hasil evaluasi Satgas ini sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Bapak Ichsan, karena kalau ingin mengetahui tentang hasil laporan kinerja atau hasil evaluasi kinerja kami menyampaikan bukan dilaporan keuangan, di laporan keuangan tidak muncul narasi seperti itu. Bapak tidak akan memperoleh jawaban atas apa yang diinginkan oleh Bapak Ichsan Pak. Oleh sebab itu, kami menyampaikan laporan hasil evaluasi Satgas 115.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, kita memahami bahwa audit keuangan itu bersifat internal dan bukan kinerja, itu keuangan. Jadi yang diperlukan oleh kita hari ini ada kinerjanya. Kita sepakati ya yang kalimat tadi tidak mencantumkan BPK dan BPKP.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah jangan protes lagi.
Pak silakan *closing statement*.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Alhamdulillah Bapak Pimpinan.
Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Kami terima kasih sekali selama Rapat Dengar Pendapat ini kami memperoleh banyak masukan dan lebih penting lagi kami didukung sepenuhnya untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami, baik di Direktorat Jenderal PSDKP maupun Pengembangan BLULPMUKP untuk lebih besar dan lebih tepat sasaran kedepan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Kita sudah menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat ini, semoga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara Kesatuan republik Indonesia. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'amin* Rapat Dengar Pendapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.35 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP.196301221991031001

